



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
KOMISI VIII DPR RI  
(BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

- Tahun Sidang** : 2020-2021  
**Masa Persidangan** : V  
**Rapat ke** : 5  
**Jenis Rapat** : Rapat Kerja  
**Dengan** : Menteri Sosial Republik Indonesia  
**Sifat Rapat** : Terbuka  
**Hari, Tanggal** : Senin, 24 Mei 2021  
**Waktu** : Pukul 10.35 s.d. 12.37 WIB  
**Tempat** : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, PT 10270
- Acara** : Pembahasan Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan di Indonesia, permasalahan dan solusinya.
- Ketua Rapat** : H. Yandri Susanto, S.Pt. (F- PAN)  
**Sekretaris Rapat** : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.  
(Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR RI)
- Hadir** : 24 anggota dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI
- Anggota yang Hadir** : **PIMPINAN:**
1. H. Yandri Susanto, S. Pt. (F-PAN)
  2. Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si.  
(F-PDI Perjuangan)
  3. H. Marwan Dasopang.
- ANGGOTA:**  
**FRAKSI PDI PERJUANGAN**
4. I Komang Koheri, SE.
  5. Selly Andriany Gantina, A.Md.
  6. Umar Bashor
  7. I. G. N. Kesuma Kelakan, ST., M.Si.
  8. H. Rachmat Hidayat, S.H.
  9. Drs. Samsu Niang, M.Pd.
  10. Matindas J. Rumambi, S.Sos.
  11. H. Arwan M. Aras T., S. Kom.
- FRAKSI PARTAI GOLKAR**
12. Hj. Itje Siti Dewi Kuraesin, S.Sos., MM.
  13. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., SH., MH.
  14. Drs. H. Hasan Basri Agus, M.M.

**FRAKSI PARTAI GERINDRA**

15. M. Husni, S.E., M.M.

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT**

16. Dra. Hj. Delmeria.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

17. Dra. Anisah Syakur, M.Ag.

18. MF. Nurhuda Y.

19. H. Maman Imanul Haq.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**

20. Ir. H. Nanang Samodra, KA., M.Sc.

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**

21. H. Iskan Qolba Lubis, MA.

22. Hj. Nur Azizah Tamhid, BA., M.A.

23. Dr. K.H. Surahman Hidayat, M.A.

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

24. H. Muhammad Rizal, S.H., M.Si.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

-

**Anggota Izin**

- :
1. Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik, M.P.A.
  2. Ina Ammania
  3. Dra. Idah Syahidah Rusli Habibie, M.H.
  4. Dr. H. Jeffry Romdonny, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.
  5. Abdul Wachid
  6. Drs. H. Zainul Arifin
  7. Drs. H. Saiful Rasyid, MM.
  8. H. Mhd. Asli Chaidir, SH.
  9. KH. Muslich Zainal Abidin
  10. H. Iip Miftahul Choiry, S.Pd.I.

**Undangan**

- : Menteri Sosial RI beserta jajaran

## **JALANNYA RAPAT:**

### **KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt.):**

*Bissmillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Selamat pagi, Salam sejahtera buat kita semua.*

Bu Menteri Sosial yang kami hormati,  
Para pimpinan Komisi VIII yang saya hormati,  
Para Anggota, hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa pada pagi hari ini paska kita banyak mengikuti kegiatan di bulan Ramadhan walaupun pernah rapat kerja dengan Bu Menteri. Tapi waktu itu saya enggak ikut Bu Menteri karena orang tua sakit Bu, sampai hari ini juga masih sakit tapi saya sempatkan untuk hadir di rapat kerja ini.

Oleh karena itu saya atas nama pribadi selaku Ketua Komisi VIII, menyampaikan mohon maaf lahir batin kepada seluruh para anggota, para pimpinan Komisi VIII, termasuk dari Bu Menteri Sosial dan seluruh jajaran. Bilamana ada salah dan khilaf selama kita berinteraksi selama ini, walaupun ada kekeliruan atau kesalahan di antara bapak ibu pastilah sebelumnya sudah saya maafkan.

Baik, Bu Menteri Sosial beserta seluruh jajaran para Pimpinan dan para Anggota sebagaimana biasa kita sebelum memulai rapat pada pagi hari ini untuk lancar dan suksesnya acara kita, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, yang beragama Islam biasa kita dengan membaca umul kitab Al Fatihah.

### **RAPAT BERDOA**

Selesai.

### **BERDOA SELESAI**

Bu Menteri yang saya hormati para Pimpinan para Anggota, para hadirin.

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan acara Rapat-rapat DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2001 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi tanggal 8 April 2001, dan sesuai dengan keputusan Rapat Internal Komisi VIII tanggal 6 Mei 2021, maka pada hari ini Senin 24 Mei 2021 Komisi VIII diberi mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, dengan agenda pembahasan kebijakan verifikasi dan validasi data kemiskinan di Indonesia, serta permasalahan dan berikut solusi dan lainnya.

Berdasarkan laporan dari pihak Sekretariat Komisi VIII sekarang dihadiri secara fisik 14 orang, memang dibatasi Bu Menteri di tengah Pandemi, secara virtual ada 15 anggota dari 9 fraksi. Oleh karena itu berdasarkan Tata Tertib DPR Pasal 251 ayat (1), maka kuorum sudah di penuhi, izinkan kami membuka rapat kerja ini dengan mengucapkan

*bismillahirrahmanirrahim* rapat kerja ini saya buka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.35 WIB.)**

Baik, agenda kita pada pagi hari ini:

1. Pengantar dari pimpinan rapat.
2. Penjelasan langsung dari Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia tentang agenda kita pada hari ini yaitu tentang verifikasi dan validasi data khususnya mengenai data yang 21 juta Bu Menteri, karena kita hampir semua anggota ini melaksanakan komunikasi, ada semacam pertanyaan besar di kalangan masyarakat apakah nama saya ikut dicoret atau tidak? Iya kan. Apakah saya tetap mendapatkan bantuan sosial atau tidak? Karena 21 juta itu sangat banyak dan ya kita perlu semua memahami, sehingga tidak ada salah persepsi terutama pada para penerima manfaat dari bantuan sosial selama ini.

Oleh karena itu penting agenda pada hari ini Bu Menteri menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan Bu, dan bilamana nanti ada hal-hal yang perlu kita adakan rapat lanjutan, dengan mungkin situasi yang perlu kita lebih siapkan terlebih dahulu ya Komisi VIII juga terbuka Bu Menteri. Oleh karena itu nanti mohon Bu Menteri jelaskan betul apa namanya agenda pada hari ini, khususnya kita fokus pada data 21 juta, yang menurut Bu Menteri itu sudah dihapus, dan terjadi di data ganda atau sepertinya datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan selama ini.

3. Tentu dari penjelasan Bu Menteri itu akan kita beri kesempatan kepada para Anggota termasuk dari meja Pimpinan untuk tanya jawab memperdalam saran dan pendapat.
4. kesimpulan dari rapat kerja hari ini. Dan
5. penutup.

Bagaimana agenda yang saya bacakan bisa kita setuju?

Setuju ya.

**(RAPAT: SETUJU)**

Kita mulai rapat pukul 10:35 tadi, kita akhiri jam 12.00 WIB dulu ya, nanti kita lihat situasi dan kondisi bila perlu diperpanjang atau bahkan bisa lebih cepat rapatnya, setuju ya? Baik.

Bu Menteri yang kami hormati.  
Para Pimpinan, para Anggota Komisi VIII.  
Hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan di awal pembukaan tadi di agenda rapat bahwa hari ini, agenda kita sangat strategis bagian dari pengawasan Komisi VIII DPR RI terhadap kinerja mitra kerja Komisi VIII, di antaranya Menteri Sosial Republik Indonesia yang sangat strategis karena banyak menangani masalah kemiskinan, termasuk di dalamnya bantuan sosial selama ini. Oleh karena itu kami sampaikan ke Bu Menteri awal kami diberi tugas dan mandat semua anggota termasuk di meja Pimpinan di Komisi VIII ini, salah satu fokus kami ada Pak Ace ini Ketua Panja Verifikasi Validasi Data, Bu Menteri.

Di awal kami bertugas di Komisi VIII bahwa konsentrasi kami sebagai bagian dari yang diamanatkan oleh rakyat untuk merapikan data kemiskinan itu menjadi sungguh menjadi konsentrasi kami. Oleh karena itu kami pernah membuat Panja Verifikasi dan Validasi Data, kami juga beberapa kali melakukan kunjungan spesifik ke pemerintah daerah apakah itu gubernur maupun bupati, walikota, termasuk juga kami undang di sini, karena kami memang betul merasakan ada orang yang berhak mendapatkan bansos justru tidak mendapatkan Bu Menteri, tapi ada orang yang tidak berhak justru mendapatkan, misalkan di Banten waktu itu kunjungan di kantor gubernur ada polisi dan tentara mendapatkan bantuan, ada anggota DPRD mendapatkan bantuan sosial. Nah tapi ada juga masyarakat yang tercecceh, yang harusnya mendapatkan bantuan justru terabaikan, dan mereka mungkin sudah banyak mengurus tetapi tidak tangannya tidak kesampaian Bu Menteri. Oleh karena itu kita menyadari data merupakan awal dari semua persoalan yang menjadi apa namanya kekisruhan bantuan sosial itu.

Nah oleh karena itu maka keseriusan Komisi VIII membentuk Panja Verifikasi dan Validasi Data, dan kami juga sebagai komitmen juga waktu itu menyetujui anggaran untuk melakukan perbaikan data seluruh Indonesia tahun anggaran tahun 2021. Itu artinya Komisi VIII memang sepakat dengan Bu Menteri bahwa data kemiskinan ini menjadi data yang harus kita perbaiki, yang harus kita rapikan karena itu berakibat dengan anggaran yang kita gelontorkan Bu Menteri. Kalau misalkan data itu tidak tepat, dan waktu kami mengundang pemerintah Cianjur di sini ada 3.000 paket bantuan yang tidak bisa disampaikan Bu Menteri, kenapa? Alamatnya enggak tahu, orangnya enggak bisa disentuh, apa enggak bisa dijangkau. Nah ini bagian dari konsentrasi Komisi VIII. Oleh karena itu bilamana seperti yang sudah kita ketahui Bu Menteri sudah menyampaikan 21 juta Pak, Bapak ibu 21 juta itu suatu angka yang sangat fantastis, kalau itu di selaraskan dengan anggaran, ya itu bisa sangat mengaitkan kita. Oleh karena itu komitmen kita diberi amanat oleh rakyat, saya kira sama Bu Menteri kita tidak mau anggaran itu tercecceh kepada hal-hal yang tidak bertanggungjawab sehingga kita perlu merapikan data.

Nah oleh karena itu pada kesempatan kami pada pagi hari ini semua waktu itu ada Rapat Internal di Komisi VIII Kapoksi dan Pimpinan bersepakat Bu Menteri 21 juta itu basisnya apa Bu? Iya kan, kalau bisa per kabupaten/kota bagaimana? Karena memang harus kita lakukan dengan tugas ini jangan sampai ada kabupaten/kota sekitar 110 kabupaten/kota yang sama sekali hampir 10 tahun tidak melakukan perbaikan data. Bagaimana mungkin orang sudah meninggal, ada yang sudah jadi kaya, ada bahkan yang

kaya jadi miskin. Nah ini saya kira tugas kita semua untuk memastikan bahwa data yang kita sajikan, karena akan ada ikutannya dengan anggaran APBN itu bisa kita pertanggung jawabkan. Nah sama dengan kami sebagai sebelum di Komisi VIII Bu Menteri kami di Komisi II dua periode, sama Bu data pemilu kita carut marut selama ini bu. Tetapi ketika masuk ke NIK (nomor induk kependudukan) tunggal dengan kerja sama dengan Dukcapil itu bisa kita tekan hampir sama sekitar waktu itu hampir 15 juta pemilih. Nah itu artinya ada memang perapian data itu penting, karena ada orang data KTP-nya dua, tempat tinggalnya dua ketika ada e-KTP itu bisa kita rapikan.

Nah sama Bu Menteri waktu itu kita sudah undang juga di sini Dirjen Dukcapil untuk merapikan data kemiskinan ini, kita ingin sandingkan dengan Dukcapil, kita ingin sandingkan dengan statistik. Nah oleh karena itu letupan dari Bu Menteri yang melaporkan ada 21 juta data kemiskinan bermasalah, saya kira ini perlu kita *clearkan*, sehingga pertanyaan was-was atau pasangka-prasangka dari masyarakat yang penerima manfaat itu tidak ketar ketir Bu Menteri. Jangan-jangan saya dicoret, jangan-jangan saya masih berhak tapi kena coret, nah ini mungkin parameter atau basis dari Kementerian Sosial untuk mengatakan bahwa ada 21 juta data itu bermasalah perlu kita *clearkan*, karena sebentar lagi kita akan membahas anggaran, kalau memang 21 juta itu bermasalah tentu akan berakibat dengan pengurangan anggaran. Atau mungkin tidak dikurangi tapi kita karena antrinya banyak saya tahu Bu Menteri yang mendapatkan manfaat itu masih sangat terbatas yang antri memang panjang. Nah mungkin dengan perapian data itu yang sama sekali belum tersentuh selama ini berhak mendapatkan, bisa kita masukan untuk penerima manfaat.

Nah oleh karena itu saya kira penting forum ini, rapat kerja hari ini biar diketahui oleh publik terutama kaum miskin atau yang berhak mendapatkan manfaat dari Kementerian Sosial itu ada semacam kepastian informasi yang benar untuk kita sampaikan kepada mereka, termasuk para Pemda atau para *stakeholder* yang lain, sehingga komitmen Bu Menteri kita apresiasi bahwa data yang bermasalah tidak boleh kita pertahankan tapi kita penting untuk memastikan bahwa basisnya benar, parameternya benar, tolak ukurnya benar, cara verifikasinya benar, nah ini yang paling penting kita ingin konfirmasi pada hari ini.

Saya kira itu Bu Menteri pengantar dari kami, mudah-mudahan sekali lagi dengan komitmen kita semua persoalan data ini menjadi bisa selesai, kalau selesai insyaallah di atas 50% persoalan bangsa ini selesai. Karena kalau data salah maka tentu arah kebijakan dan anggaran bisa bermasalah. Saya kira itu Bu Menteri, kami selanjutnya kami persilakan kepada Bu Menteri untuk menyampaikan paparan sebagaimana yang kami maksud tadi. Kepada Bu Menteri kami persilakan.

## **MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA (TRI RISMAHARINI):**

Terima kasih Pak Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim,  
*Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*  
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.  
Syalom om swastiastu.  
Namo budaya.  
Salam kebajikan.  
Rahayu.

Yang terhormat ketua Komisi VIII DPR RI,  
Yang terhormat para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI,  
Yang terhormat para anggota Komisi VIII DPR RI, dan  
Hadirin undangan yang berbahagia.

Mengawali pertemuan ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga kita dapat memenuhi undangan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial pada hari Senen 24 Mei 2021 tentang kebijakan verifikasi dan validasi data kemiskinan di Indonesia, permasalahan dan solusinya.

Pimpinan sidang, Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, serta  
Hadirin yang berbahagia.

Perlu kami sampaikan jadi pertama kali permasalahannya adalah, saat kami mendapatkan hasil temuan BPK, BPKP, BPK dan KPK. Jadi permasalahan awal adalah disini, tahun 2020 BPKP menyampaikan terdapat 3.877.000 sekian data NIK penerima Bansos yang tidak valid. Kemudian terdapat 41 ribu sekian duplikasi data KPN keluarga penerima manfaat dengan nama dan NIK yang sama, kemudian yang ketiga terdapat PM bansos yang tidak layak, tidak miskin, tidak mampu, tidak rentan sebanyak 3.060 KPM di Jabodetabek. Terdapat KPM telah pindah meninggal tanpa ahli waris tidak dikenal, tidak ditemukan sebanyak 6.921 KPM. BPK menyampaikan pada pemeriksaan 2020 yang sama, dan ini terjadi sebelum semua, sebelum saya menjadi Menteri, kemudian terdapat data NIK tidak valid sebanyak 10.922.000 sekian, ART nomor KK tidak valid sebanyak 16.000.000 sekian ART, nama kosong sebanyak 5.700 sekian, serta NIK ganda sebanyak 86.400 sekian ART pada DTKS penetapan Januari 2020.

Yang kedua, bantuan secara tunai senilai 500 ribu untuk KPM sembako non PKH disalurkan kepada 14.000 sekian KPM yang memiliki NIK ganda. NIK ganda dan 239 ribu sekian KPM yang memiliki NIK tidak valid. Kemudian temuan KPK didapati sejumlah 16 juta sekian data tidak padan Dukcapil, kemudian pemutakhiran DTKS berpotensi in-efisiensi dan tumpang tindih. Rekomendasinya dari KPK pemadanan data DTKS dengan Dukcapil, penggunaan NIK sebagai key field, jadi seperti itu. Ini presentasinya BPKP, hasil pengawasan atas akurasi data bantuan sosial, *cleansing* data nasional 2020 NIK ganda, NIK invalid menerima lebih dari satu jenis Bansos, *cleansing* data bansos APBD 2020, menerima lebih dari satu jenis bansos, KPM ganda, jadi keluarga penerima manfaat ganda.

Kemudian ini ada datanya lengkap dari BPKP, kemudian *monitoring* data salur. Jadi data-data di DTKS itu ada 150 juta lebih, 155 juta di DTKS, kemudian ini yang disalurkan itu berapa? Nah ini *monitoring* terhadap data

salur. Jadi tidak semua 155 juta ini menerima, jadi ada yang sebagian disalurkan dan ada yang belum, ada yang tidak. Kemudian disampaikan oleh *monitoring* data salur Bansos tahun 2021 oleh BPKP dan APIP NIK tidak padan antara pusat dan daerah. Kendala akses ke SIKS-NG dan Dukcapil kurang, kurang Sarpras termasuk jaringan internet, SDM terbatas dan kurangnya sosialisasi cara perbaikan. Kemudian rekomendasi BPKP Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk menyelesaikan masalah NIK dan seterusnya. Kemudian hasil pengawasan atas akurasi data Bansos, Pengawasan BSP menerima lebih dari satu jenis bansos, jadi ada PKH, kartu sembako, BLTDD dan Bansos Pemda.

Kemudian yang kedua adalah KPM ganda, artinya keluarga penerima manfaat ganda, tidak tepat sasaran. Jadi KPM ganda itu bisa satu KK menerima lebih dari satu, jadi bisa menerima dua bahkan ada yang bisa menerima tiga dalam satu keluarga. Kemudian KPM meninggal, KPM pindah dan tidak ditemukan, kemudian NIK invalid nanti contoh-contohnya akan saya jelaskan seperti apa bentuknya. Kemudian pengawasan bansos beras, KPM ganda. Jadi yang tadi kami sampaikan jadi satu keluarga bisa menerima dua atau tiga, kemudian NIK invalid nanti kami bisa jelaskan NIKnya invalid seperti apa? Kemudian pengawasan PKH, jadi tidak memiliki komponen PKH, tidak ditemukan pindah alamat atau meninggal dunia. Jadi tidak ditemukan pindah alamat atau meninggal dunia, kemudian KPM ganda, sekali lagi KPM ganda, kemudian NIK invalid, menerima lebih dari satu jenis bansos BST atau BLT.

Jadi di aturan Kemensos disampaikan tahun berapa ya? 2020, bahwa penerima bantuan itu PKH boleh bersama dengan BPNT, tapi tidak boleh satu keluarga itu menerima dua jenis bantuan, jadi PKH misalkan satu keluarga menerima dua tidak boleh. Kemudian BPNT satu keluarga menerima dua enggak boleh. Kemudian kalau penerimaan sudah menerima PKH atau sudah menerima BPNT tidak boleh menerima BST seperti itu jadi di aturan Kamensos 2020. Kemudian pengawasan BPNT KPM ganda ini yang tadi kami sampaikan, kemudian NIK invalid, kemudian menerima lebih dari satu jenis bansos ini yang tadi kami maksudkan BST dan/atau BLT.

Kemudian ini rangkumannya tidak usah saya. Jadi rangkuman dari temuan, surat BPKP tentang perkembangan pengujian dalam sinkronisasi data usulan penerima BST, 11 Mei 2020 yaitu pengujian mencakup 216 dari 503 kabupaten/kota. Jumlah KK dalam DTKS pada 216 Pemkab kabupaten kota sebanyak 3.440.000 sekian, usulan Pemda non DTKS sebanyak 3.022.000 sekian, ditemukan sebanyak 1.524.000 sekian KK telah terdaftar di DTKS dan sebanyak 127.000 sekian KK merupakan data ganda dan data invalid. Sehingga usulan persiapan hanya sebanyak 1.369.000 sekian KK. Dengan demikian jumlah KK yang membutuhkan Bansos pada 216 Pemkab kota sebanyak 1.369.000 sekian dari 4.800.000 sekian tersebut kuota yang tersedia untuk disalurkan adalah 3.311.000 sekian sehingga masih terdapat 1.498.000 belum dicakup oleh BST.

Kemudian laporan BPK terkait LHP kepatuhan atas pengelolaan tanggung jawab keuangan negara penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 terdapat data NIK tidak valid sebanyak 10.900.000 sekian, nomor KK tidak valid sebanyak 16.373,000 sekian, nama kosong sebanyak 5702 ART, dan

NIK ganda sebanyak 86.000 sekian ART. Pada DTKS penetapan Januari 2020 terdapat data identitas penerima bansos PKH berupa nomor identitas kependudukan NIK ganda pada setiap tahap atau bulan penyaluran bansos sebanyak 748.000 sekian KPM dengan penyaluran Bansos sebesar 240.988.000,000 sekian, bantuan program sembako disalurkan pada 593.163 KPM yang memiliki NIK ganda, dan 2.087.000 sekian KPM yang memiliki NIK yang tidak valid. Bantuan program sembako disalurkan pada 1.035.000 sekian KPM ganda identik, nanti kami bisa tunjukkan identik itu seperti apa. Kemudian 569.093 KPM ganda dalam keluarga, jadi tadi yang saya sebutkan dalam keluarga, karena satu keluarga bisa menerima dua. Jadi mintakan bapak suami atau bapak dengan anak itu menerima dari satu KK. Dalam satu KK bisa menerima lebih dari dua Bansos ini yang tidak boleh di aturan Kemensos, yang memiliki NIK ganda dan 239 ribu sekian KPM yang memiliki NIK tidak valid.

Yang ketiga, Surat Edaran KPK tanggal 29 April 2020 pemadanan DTKS dengan data Dukcapil di Kemendagri UP Dirjen Dukcapil berdasarkan nomor induk kependudukan. Perbaikan ketepatan status PM dengan bantuan pendataan oleh pemerintah daerah, dan prosedur verifikasi. K/L dan Pemda dapat melakukan pendataan di lapangan, K/L dan Pemda mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam bentuk menjamin keterbukaan, meningkatkan peran serta masyarakat dengan menyediakan fasilitas pengaduan dan membuka informasi tindak lanjutnya. Surat hasil kajian KPK terhadap pengelolaan bantuan sosial tanggal 3 Desember 2020, akurasi data penerima bantuan sosial, kualitas data penerima bantuan sosial, transparansi data dan pemutakhiran data. Jadi kenapa kemudian kami menyampaikan? Karena ini adalah hasil temuan KPK.

Kemudian penyaluran bansos beras, sinkronisasi program bansos, waktu perencanaan dan implementasi serta mitigasi resiko. Berdasarkan hasil pemadanan DTKS penetapan Januari 2020 dari Kemensos dengan data NIK pada Dirjen Dukcapil Kemendagri yang dilakukan pada bulan Juni 2020 dari 97 juta sekian, data yang dipadankan masih terdapat 17,28% data yang tidak padan dengan NIK Dukcapil atau sebesar 16 juta sekian data. Sementara dari 82,73% DTKS yang sudah padan masih terdapat 1,06 juta data ganda dan 234 ribu data yang sudah meninggal. Dari DTKS yang sudah padan dengan NIK masih teridentifikasi 17.700.000 sekian, anggota keluarga inti lainnya baik kepala keluarga. Jadi ini suami, istri, anak yang susul tidak termasuk di dalam data DTKS maksudnya tidak ada di dalam DTKS.

Kemudian 8,84% data penerima program PKH khususnya pengurus kartu tidak berasal dari DTKS, nanti akan kami jelaskan kenapa demikian? Ada atau sejumlah 884 ribu sekian KPM keluarga penerima manfaat, 5,76% data penerima program BPNT, kartu sembako tidak berasal dari DTKS. 26,3 juta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tidak berasal dari DTKS dan 10,3 juta jiwa yang terdapat pada DTKS belum terdaftar pada BPJS kesehatan. Berdasarkan data BPJS kesehatan diketahui sekitar 600 ribu jiwa dalam DTKS terdaftar sebagai peserta sebagai pekerja penerima upah penyelenggara negara. Berdasarkan pemadanan yang dilakukan di internal Kemensos masih didapati data ganda pada penerima bantuan sembako. Berdasarkan pengelolaan data bantuan sosial di Jawa Barat dan Jawa

Tengah masih ditemukan penerima bansos reguler, menerima bantuan terkait dengan penanganan Covid-19 seperti bantuan sosial tunai dan bantuan langsung tunai, dana desa jadi menerima ganda.

Memperbaiki akurasi data DTKS antara lain dengan cara melakukan pemadanan dengan Kemendagri sebelum penetapan DTKS untuk memperbaharui data terkait lahir mati dan pindah. Melakukan perbaikan tata kelola internal, mengintegrasikan data salur bansos terpadu di internal Kemensos. Yaitu penetapan penerima PKH dan BPNT dan DTKS di Pusdatin Kemensos. Jadi kami perlu jelaskan. Jadi di awal Pak ini ada DTKS kemudian ini ada data PKH sendiri dikelola oleh Dirjen Linjamsos, kemudian ini ada data BST, kemudian ini ada data BPNT. Jadi kenapa daerah mengusulkan ke SIKS-NG, itu kenapa tidak masuk begini? Karena memang tidak ada koneksinya, antara iya. Jadi inilah yang kemudian kemarin kita tertibkan pak, saya melakukan penertiban ini, dan sekarang alhamdulillah sudah satu. Jadi data DTKS akan digunakan untuk tiga jenis bantuan ini, jadi tidak ada lagi tawar-menawar. Jadi kalau ada usulan masuk daerah itu masuk DTKS, kemudian DTKS menyerahkan data itu ke dua bantuan sekarang. Dulu kemarin 3 sekarang 2 jadi BPNT dan BKH, itu, jadi seperti itu.

Nah kemudian lah ini-ini kenapa permintaan dari KPK seperti itu? Kemudian berikutnya menjadikan padan NIK dan DTKS sebagai persyaratan penyaluran bantuan sosial yang begitu tuangkan dalam perjanjian kerja sama dengan himpunan bank milik negara sebagai penyalur bansos. Mengintegrasikan seluruh data penerima bantuan sosial di pasca pandemik Covid-19 dalam satu basis data. Kemudian belum tersedia akses publik satu pintu terhadap data penerima Bansos, ini yang- yang kenapa kemudian kita hanya dari DTKS nanti kedepannya, penerima ini. Jadi daerah mengusahakan lewat DTKS, kemudian baru digunakan untuk BPNT dan BKH, kemudian menjadikan HTP cek Bansos SIKS Kemensos go.id sebagai pelaksana flatpon sumber data. Kemudian memastikan vendor penyalur Bansos menyediakan dasbord informasi penyaluran untuk monitoring dan evaluasi pengambilan keputusan.

Jadi atas dasar ini, saat ini kami sedang menyiapkan pak data koneksitas dengan data Dirjen Dukcapil supaya daerah juga bebannya tidak berat, jadi kami akan bangun fiber optik yang besar dengan Dukcapil dengan Kementerian Keuangan dan nanti kita juga minta Himbara, sehingga ada dasbord khusus yang untuk penanganan ini. Kemudian akibat dari regulasi yang tidak sinkron maka terdapat beberapakali pemutakhiran data antara di DTKS dan pemutakhiran program bantuan sosial di lapangan keluarga yang sama bisa dimutakhirkan sampai 3, 4 kali. DTKS, BKH, PBI, BPNT padahal yang terpenting dan terutama adalah memastikan pemutakhiran DTKS dan menentukan penerima program bantuan berdasarkan DTKS. Rencana pemutakhiran DTKS serempak diprogramkan pada tahun 2021, dengan pendekatan sentralistik. Penyelenggara adalah Kementerian Sosial sendiri dibawah Pusdatin Kemensos dan mencakup seluruh pemerintah daerah seindonesia. Data terbaru Juli 2020 di Kemensos menunjukkan bahwa mayoritas pemerintah daerah justru sudah melakukan pemutakhiran DTKS dengan kategori sebagai berikut, 406 pemerintah daerah melakukan finalisasi data, dimana 331 pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi

kepada lebih dari 10% jumlah DTKS-nya, 63 pemerintah daerah tidak melakukan pemutakhiran per Juli 2020, 48 pemerintah daerah belum pernah melakukan *update* sama sekali sejak 2015.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pandemic Covid 19 secara tidak langsung telah menggugah partisipasi Pemda untuk berkontribusi dalam pemutakhiran data DTKS. Dinamika lainnya adalah Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri Nomor 40 tahun 2020 tentang Penetapan Pedoman Penyusunan Kerja Rencana Daerah 2021 yang sudah mewajibkan pemutakhiran data terpadu, penanggulangan kemiskinan dijadikan sebagai prioritas dalam dokumen perencanaan daerah. *Sampling* yang kami lakukan terhadap 81 Pemda menyatakan bahwa 68% atau 55 Pemda sudah menganggarkan dana APBD untuk pendataan. Verifikasi dan validasi DTKS pada tahun 2021 selaras dengan Permendagri Nomor 40 Tahun 2020. Efisiensi anggaran untuk program kemutakhiran 2021 akan terjadi sebesar Rp581.000.000.000,- rincian rencana rata-rata anggaran verifikasi dan validasi per rumah tangga yang akan dikeluarkan Kamensos tahun 2021 ternyata jauh lebih besar dari rata-rata anggaran pendataan dan verifikasi dan validasi yang dikeluarkan Pemda untuk memutakhirkan data kesejahteraan sosial tahun 2020.

Program Kamensos mengaitkan rata-rata per data Rp30.218,- dibandingkan dengan anggaran Pemda Rp16.272,- per data, melakukan harmonisasi kebijakan khususnya Permensos terkait pemutakhiran terpadu antara DTKS dan penerima program bantuan dengan menegaskan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih. Memperhitungkan kembali risiko inefisiensi serta tumpang tindih kegiatan dan anggaran dengan mempertimbangkan opsi pelaksanaan melalui dana dekonsentrasi, dengan alokasi dana untuk Pemda masing-masing, maka in efisiensi sektor tercapai dan pemutakhiran data akan terjamin karena adanya rasa kepemilikan data oleh pemerintah daerah.

Surat rekomendasi Stranas PK untuk perbaikan DTKS 11 Desember 2020, temuan NIK padan hanya 75,6% dari data yang berhasil dipadankan terdapat 111.000 sekian telah meninggal. Terdapat 9.800 sekian data tidak bisa dipadankan karena anomali nama kosong, terdapat 1.700.000 sekian NIK dan nama ganda, terdapat 98.000 sekian data ganda nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir dan nama ibu. Rekomendasi menghapus anomali nama kosong menyesuaikan DTKS dengan data kependudukan yang berhasil dipadankan, termasuk mengisi elemen data kosong, memastikan penggabungan program bantuan yang diberikan kepada data ganda. Jadi yang tadi 3 bantuan itu Pak, diminta untuk kita menjadikan satu data, jadi yang ini maksudnya seperti itu, dan alhamdulillah kita sudah lakukan itu saat ini. Kemudian merumuskan solusi perbaikan data 22.000.000 sekian, jadi lebih besar dibandingkan data kami pak, sebetulnya.

Kemudian ini temuan-temuan arsip, pemeriksaan arsip, ya kemudian upaya yang kita lakukan. Jadi ini ada peta dimana tadi ada yang data menerima tadi kami sampaikan ada yang menerima, ini berangkat dari data salur Pak. Jadi bukan data DTKS yang 155.000.000. Jadi kami punya data 155.000.000 yang saat ini sedang kami proses pepadannya dengan

Dukcapil kependudukan. Nah ini adalah data salur, kami menganalisa data yang sudah pernah disalurkan, jadi jumlahnya kurang lebih 56.000.000. kurang lebih yang sudah pernah disalurkan.

Kemudian ada yang perlu kita lakukan adalah jadi penyatuan 4 pulau data, jadi yang tadi kami sampaikan ada DTKS, ada PKH, ada BPNT dan ada BST. Sehingga kami jadi satukan, supaya akhirnya terjadilah itu yang tadi keluar, kenapa kemudian keluar akhirnya 21 juta itu. Nah di *new* DTKS 1 April 2020 kemudian menegakkan kriteria data, pemadanan Dukcapil kecuali Papua karena masih banyak belum direkam, perekaman kemudian Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara, NTT jadi ini pertimbangannya kenapa kita? Karena masih banyak yang ada di atas gunung-gunung belum kita data. Ini kita akan melakukan upaya terus untuk pendataan, kami minta bantuan ada beberapa perguruan tinggi yang membantu termasuk di Papua untuk kemudian keluarga suku anak dalam, suku KAD. Kemudian PM tunggal, jadi PM tunggal itu satu keluarga, jadi satu keluarga, jadi kan satu keluarga itu ada suami, anak begitu, nah ini penyatuan PM yang kita lakukan karena ada yang satu keluarga itu menerima 2 atau 3 bantuan yang tadi saya sampaikan.

Kemudian data Bansos per KPM tunggal, kemudian Bansos tidak *overlap* kecuali PKH ini peraturan Permensos saya belum membuat peraturan baru Pak, ini peraturan Permensos yang lama. Jadi kecuali PKH dan BPNT itu boleh di Permensos yang lama, tapi kalau PKH, BPNT dan BST tidak boleh. Tiga tidak boleh atau PKH dua BPNT dua atau BPNT dan BST tidak boleh itu aturan Permensos yang lama saya belum merevisi ini. Kemudian pembenahan proses, semua Bansos menggunakan data *new* DTKS yang sudah padan dengan kependudukan kecuali 6 daerah tadi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT dan KAT. Kemudian periodisasi bulanan penetapan DTKS, jadi kita tetapkan tiap bulan. Jadi Minggu kita rutin pak mulai Januari, minggu ketiga kita lakukan rapat dengan Himbara, dan Kementerian Keuangan dan Bappenas juga dengan BPKP, dengan KPK, dengan Kejaksaan Agung, dengan kepolisian itu rutin kita rapatkan tiap bulan, karena untuk persiapan pencairan bulan berikutnya. Sehingga dengan Dukcapil sehingga kita ketahuan kalau mereka meninggal bulan lalu, maka kemudian ini prosesnya seperti apa gitu, seperti itu.

Kemudian usulan dari daerah, jadi ini usulan dari daerah kita menampung usulan daerah kurang lebih mulai bulan Januari sampai dengan kemarin kita tutup bulan April kurang lebih ada 7.000 usulan baru dari daerah, 7.000.000 mohon koreksi 7.000.000. Kemudian rekonsiliasi hasil penyaluran ke *new* DTKS, jadi ini rekon rutin dengan bank penyalur dan PT Pos.

Kemudian peningkatan inklusi dan akuntabilitas informasi publik melalui web *check* Bansos dengan ini kita rencanakan 1 Januari ini, mohon maaf 1 Juni itu akan menggunakan *mobile apps*. Jadi bisa digunakan pakai handphone apakah dia sudah menerima, dan nanti ada usulan mandiri, dia bisa mengusulkan kenapa? Karena di bawah juga kita mendengar usulannya ada dipilih temannya apa gitu. Nah tapi nanti akan tetap ada *verivalinya* di lapangan. Kemudian ada verifikasi diperkuat oleh proses QA (*Question and Answer*) kemudian sanggahan atas kelayakan penerima Bansos. Jadi siapapun boleh menyanggah. Kalau misalkan ini tidak berhak itu dia

menyatakan kenapa? Jadi kami terima surat sekarang ini kami ditindaklanjuti dengan Kejaksaan Agung, dengan BPK ini ada malah yang sudah masuk ke apa namanya, investigasi pak, investigasi itu nanti bisa disanggah. Jadi kalau dia tidak layak maka boleh siapapun menyanggah seperti itu.

Nah kemudian pemantauan program salur oleh PM, jadi penerima manfaat juga bisa mengecek, apakah mereka sudah disalurkan apa belum? Karena *nyuwun sewu* kan ada di kami, kemudian kami kirim ke Kementerian Keuangan, kami juga akan membuat jaringan dengan Kementerian Keuangan, alhamdulillah sudah dibuka. Nah kemudian itu ke bank atau ke PT Pos, permasalahannya adalah apakah dari bank itu sudah disalurkan? Maka kemudian dia boleh *complain* kalau misalkan saya kok belum cair gitu, dengan cukup dengan apa *mobile apps*. Jadi dengan bisa dengan *handphone* seperti itu, nanti ke depannya.

Kemudian saat ini kondisinya adalah, jadi saya mengirim surat kepada kepala daerah untuk perbaikan data yang kurang dari 50%, jadi Pemda boleh mengajukan perbaikan data. Kalau dia tidak berkenan atau ini tidak layak menerima bantuan, maka dia boleh menyatakan ke kita, nanti akan ada jumlahnya berapa yang ditolak, apa namanya? Di-*denial* atau di tidak layakkan oleh Pemda ada. Menurut Pemda ini tidak layak karena di Perpres berapa ya? Harus dari daerah data itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 bahwa data itu harus dari daerah. Jadi data-data untuk penerima itu harus dari daerah usulannya, jadi kami pegang itu.

Kemudian surat Mensos tanggal 25 Maret, jadi surat tanggal 12 Maret, kemudian 25 Maret kami kirim surat, kemudian 19 April, jadi khusus untuk daerah-daerah yang kurang dari 50% kita turun pak. Ada di beberapa daerah kita bantu untuk bagaimana percepatan validasi itu, minimal padan dengan Dukcapil minimal itu. Jadi kemudian setelah itu daerah harus wajib untuk memverifikasi apakah ini sudah layak apa tidak? Untuk data yang meninggal kami sudah *connect* dengan data kependudukan, permasalahannya memang tidak semua daerah itu *connect* dengan data kependudukan. Maksudnya kalau meninggal lapor, atau kalau pindah itu lapornya tidak ada, itu ada yang seperti itu bentuknya. Sehingga kita masih carikan data tapi nanti masyarakat yang pindah itu bisa menyampaikan informasi lewat ini tadi, cek data DTKS itu, jadi mereka bisa lapor.

Kemudian perbaikan data lebih besar 50% dari 274 Pemda dengan surat Mensos, jadi untuk pemadanan, kemudian tanggal 25 Maret untuk verifikasi kelayakan dan pemadanan data kependudukan, permohonan penghapusan ini yang tadi saya sampaikan, jadi daerah menyatakan tidak layak, itu mereka nyatakan kepada kita nanti katanya ada. Kemudian pengajuan usulan data baru, nanti akan saya tunjukkan bentuknya, jadi nanti ke depan bapak, diumumkan data, diumumkan ke publik 48.000.000. 48.000.000 Padan Dukcapil ini yang kita verifikasi karena data salur pak. Kemudian *update* data tiap bulan proses dari RT/RW bapak ibu nanti bisa melihat itu kita akan buka semua transparansi dari RT/RW sampai daerah. Kemudian semua bisa melihat, kemudian penjamin kualitas kalau ada perbedaan, dari RT/RW kemudian masyarakat ada perbedaan dari daerah maka nanti verifikasi kami sudah kerja sama dengan Kemendikbud, untuk

membuat kampus merdeka kami diberikan 20 sks, untuk nanti para mahasiswa itu membantu untuk daerah, dan masyarakat kalau dia ingin menginput atau dia mengusulkan dirinya untuk penerima bantuan sosial.

Kemudian perbaikan data, jadi melalui parameter kemiskinan, bencana dan sebagainya, jadi yang kami masukkan Pak itu yang baru, itu adalah bencana. Kemudian realisasi mingguan ini kalau ada yang meninggal dan sebagainya, kemudian lahir, mati, pindah, datang jadi kalau dia lahir misalkan orang miskin dia lahir nanti ke depan bisa *diupdate* data itu dengan data kalau dia masuk PKH. Misalkan dulunya anaknya satu kemudian dia punya anak dua, nah itu kan item di PKH itu sangat apa orientasinya sangat keluarga. Jadi maka dia bisa mengajukan tambahan itu, termasuk data kalau dia misalkan dari SD ke SMP, kemudian SMP ke SMA maka kemudian dia berhak untuk mengajukan itu, tambahan indeks seperti itu. Jadi ini lahir, mati, pindah, datang jadi dia baru bisa menyatakan kalau saya pindah, maka saya diterimakan di sini, karena selama ini kesulitan, daerah pun kesulitan bank pun kesulitan, PT. Pos juga kesulitan karena mereka tidak memberitahu pindah kemana, sehingga kita sulit untuk melakukan itu.

Jadi ini nanti saya akan tunjukkan, jadi data tidur bukan saya hapus Pak. Karena nanti kalau yang meninggal dihapus, nanti di jebol kita enggak tahu, apa namanya? Mohon maaf saya pernah jadi saksi di DKI sini ada data orang meninggal, kenapa meninggal? Karena dipakai untuk bobol bank. Jadi kenapa ini kita tidak hapus, kita tidurkan, kita bisa keluarkan sekarang pun,. Tapi harus ada SOP-nya saat membuka ini, karena kalau nanti terjadi sesuatu maka kita bisa buka data ini.

Jadi itu pernah terjadi, karena itu kenapa saya katakan bukan dihapus tapi ditidurkan. Karena kalau dihapus nanti kalau ada *track*-nya itu dia kemudian, contohnya begini misalkan, kalau dihapus dia sudah meninggal, bisa saja karena kami tidak punya data yang awal, misalkan kejadiannya sebelum ada pelaporan dari Dukcapil dihidupkan lagi. Karena tadi nah kalau ada itu maka kemudian secara otomatis dia akan *linkage* gitu, oh ya sudah meninggal datanya, seperti itu secara teori bisa Pak, secara teknik-teknik bisa, seperti itu. Karena kalau nanti ada yang hidupan lagi yang meninggal ini kita enggak tahu, karena misalkan kejadiannya meninggalnya sudah 2017, atau 2018 kita enggak tahu, jadi bukan dihilangkan, bukan dihapus tapi ditidurkan. Karena nanti harus ada koneksi begini pak untuk *cross check* data, kenapa dia di, kenapa dia ditidurkan?

Kemudian ini yang perbaikan data daerah, jadi daerah-daerah menyurvei apakah tadi verivali apakah dia masih layak atau tidak? Ini kita serahkan daerah karena sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Data, bahwa verifikasi itu harus dilakukan oleh daerah. Kemudian ini ada usulan baru dari daerah 7.427.109 ini baru, ini tetap masuk harus lewat DTKS, kemudian 670.000 nya ditolak atau di-denial di apa namanya itu? Di-tidak-layakan oleh daerah itu 670.000. Jadi yang berhak mentidaklayakkan itu tetap daerah pak bukan kami, kita hanya menetapkan, karena tadi kita berpegang pada Undang-Undang Nomor 13 tadi Tahun 2011 bahwa usulan itu data harus dari daerah. Jadi new DTKS itu yang semesta itu 139.000 tadi 139.000.000 ini yang padan dengan kependudukan. Nanti mungkin bisa

dipakai oleh BPJS, bisa dipakai oleh GAS, bisa dipakai oleh macam-macam kita siapkan pak, ini sudah padan dengan data kependudukan. Nah padan Dukcapil 100.000.000 sekian, jadi semestanya 139.000.000 setelah kita *cleansing*.

Kemudian penerima Bansos salur yang dibuka oleh publik itu 52.674.000 sekian, jumlah data perbaikan kota yaitu Februari ini mungkin bisa dilihat datanya ada 312 daerah kota, kemudian naik di bulan Maret 319, kemudian sampai dengan bulan April untuk perbaikan datanya sudah 385 daerah. Ada beberapa daerah yang memang kita butuh bantuan seperti Papua kita minta bantuan mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Cendrawasih untuk membantu. Kemudian ini datanya Pak presentasi progres perbaikan data ada di kita, saya pikir saya tidak perlu baca jadi kurang dari 25% itu rata-rata memang di Papua dan Papua Barat. Jadi ini nanti yang kita bantu intens untuk perbaikan datanya. Jadi sampai 50% itu juga masih sebagian besar di Papua dan Papua Barat serta ada di Maluku. Kemudian ini datanya, kemudian ini progres perbaikan data kurang dari 20. Nah ini contohnya Pak, ini perlu saya tambahkan, gimana Bapak izin? Perlu ditampilkan? Karena menyangkut juga yang lain bukan hanya kami mohon izin Pak.

Disampaikan Pak, baik Pak. Jadi contohnya begini, tolong yang data pertama itu yang Yati NIK-nya 9999 itu ada berapa nomor, berapa? 12, Yati enggak kita hilangkan, kita betulkan NIK-nya tapi yang 11 itu yang kita hapus, yang kita tidurkan. Kemudian berikutnya Nurhayati NIK-nya sama bisa *dipirsani* yang samping kanan itu 35 ya belakangnya 001 itu Nurhayati enggak kita hapus, tapi yang lainnya Nurhayati itu kita hapus kita tidurkan, *pirso* ya Pak, saya gimana caranya? Jadi ini Pak, ini Nurhayati satu nama, NIK-nya sama. Jadi mohon maaf Pak dulu *software*-nya di kementerian itu ya saya, saya mohon maaf itu dibuat per provinsi. Saya enggak begitu saya gabung ketahuanlah seperti ini. Jadi alamatnya beda tapi NIK-nya sama, tapi namanya juga sama, itu yang satu kita ambil Nurhayati yang layak, kemudian yang sisanya yang kita tidurkan.

Nah berikutnya Slamet, Pak. Slamet ini terkenal sebelumnya saya survei dia menerima 39 bantuan pak, NIK-nya sama sudah ketemu di Pemilu pak o iya, cocok berarti pak, iya-iya sudah cocok pak. Kemudian nama ibu kandung Siti Hawa sama ya Bu? Dia ya itu sudah itu pak, yaitu kalau itu tetap keluar Pak nanti jadi dobel dia menerimanya. Itulah kenapa kemudian kita tidurkan. Kemudian yang tadi saya juga menertibkan, kalau satu KK itu dia menerima 2, 3 bantuan kan tidak boleh Pak, bayangkan kalau PKH itu bisa Rp800.000,- pak per bulan, tapi ada yang paling rendah berapa Rp200.000,- oh Rp350.000,- ada tapi kalau dua menerima kan dia bisa 700 terimanya, bisa Rp1.050.000,- kalau tiga, nah itu yang kita potong kita tidurkan dua itu.

Kemudian ada yang menerima tiga bantuan dulu awalnya pak, ini sebelum BST berakhir, jadi dia menerima PKH, menerima BPNT, menerima BST nah ini kita hapus. Di Permensos tahun 2020 itu hanya berhak menerima dua bantuan, itulah yang kita tidurkan, jadi pilih kenapa bukan BST? Kita pilih kita ke BPNT supaya dia menerima sampai dengan akhir tahun. Karena kalau BST kan dihapus kemarin Pak bulan April ajakan, dia nanti Mei enggak

terima. Karena itu kemudian kemarin kita pindah dia yang menerima BST dobel kita pilih BPNT, kita pindah ke BPNT. Kalau dia menerima bantuan tiga maka kemudian yang kita hapus BST-nya, tapi kalau dia menerima bantuan BST saja, ternyata dobel bantuan dengan PKH atau dengan yang lain maka kita pindah, kita mutasi dia ke BPNT. Demikian pula kalau mereka putus tidak menerima dia hanya BPNT tapi dia benar berhak, maka kita boyong dia ke BPNT supaya memang terimanya lebih kecil, kalau BPNT Rp200.000,- kalau BST Rp300.000,-, tapi dia akan menerima sampai bulan Desember.

Jadi *policy* kita kemarin begitu, supaya dia *sustain* menerima sampai bulan Desember, jadi DAK berhenti di April begitu pak, dan itupun masih ada Pak, masih ada sisa yang kita sekarang nunggu dari daerah. Sekali lagi tidak ada inputan saya kecuali yang orang yang kayak pemulung, kayak gitu baru saya masukkan karena itu, kemudian disabilitas. Yang disabilitas itu kita data kemudian kita cek rekap pendudukannya, kemudian kita masukkan Pak, kalau lainnya tetap kita serahkan ke daerah untuk dimasukkan seperti itu. Jadi tidak ada intervensi dari kami kecuali tadi yang pemulung dia tidak punya apa Namanya? Enggak punya KTP, enggak punya itu kemudian kita rekam, tidak punya keluarga itu kita rekam kemudian kita serahkan itu ke daerah untuk diusulkan termasuk yang disabilitas.

Jadi yang disabilitas kita bisa masukkan berapa Pak? Pak Hari? Pak Hari tidak ada ya? Berapa yang disabilitas 179.000 sekian itu disabilitas pak. Itu data kita kemudian kita masukkan, jadi seperti itu kira-kira dobelnya pak, jadi ini contohnya Pak, ini Tentrem Wahyuni ini terima tiga pak, Tentrem Wahyuni iya NIK-nya sama, jadi kita-kita ambil satu Tentrem itu tetap dapat tapi memang tidak tiga. Jadi setelah-setelah kita cek juga baru kita tunjukkan, kemudian NIK nama pada Dukcapil kemudian tidak perlu terpilih karena dia ganda terimanya, ini contoh-contohnya Pak.

Kemudian ini juga saya mindah pak kurang lebih 3.000.000 sekian karena bank tidak mau menyalurkan setelah kita kenceng bank tidak menyalurkan 3.000.000 berapa, berapa data bank? Lha wong namanya Norman IT pak, di data kependudukan itu namanya itu IT, namanya NA 70 enggak mau dia NA 70 namanya memang. Kemudian namanya IT, namanya THR enggak mau mencairkan pak. Jadi gimana kita iya gimana Pak? Ya sekarang akan kita ambil alih untuk kita masukkan di Pos. Kasihan mereka, mereka memang berhak menerima, tapi namanya seperti ini pak. Ini ada lahir mohon maaf pak ini data menurut pak Jonan itu data lama Pak. Jadi ada yang lahir tahun 2043, bank tidak mau ada yang lahir tahun 2060. Ini kan bukan kesalahannya penerima kan pak, bank tidak ini. Jadi akhirnya kita pindah ke PT. Pos. sekarang ini lagi persiapan untuk ke PT. Pos.

Kemudian ini tadi IT namanya, kemudian dusunnya 0 (nol) jadi dusunnya 0 (nol) enggak mau juga, kemudian RW-nya 0 (nol) kalau di desa kan tidak ada RW tidak ada RT to? Ada ya, ada ya, ini, ini tidak ada pak datanya, jadi enggak bisa ini. Ini sekarang lagi kita rekam untuk kita betulkan. Jadi data PKH sekarang ini sudah hampir 100 % Pak hampir sekarang 9.600.000 sekian, kemudian data BPNT 17.000.000 sekian. Jadi masih ada 2.000.000 ini nunggu perbaikan dari daerah. Kemudian yang BST ini yang bulan April 8.900.000 menjadi 9.000.000 sekian.

Seperti itu kira-kira, kemudian proses lama usulannya pak, jadi usulannya adalah ada informasi publik nanti yang akan juga kemudian DTKS diserahkan ke Dirjen kembali lagi, kemudian ke penyalur, penyalur kemudian BNBA ke bank, dan kemudian bank masuk ke DTKS lagi seperti itu. Karena kadang tidak sama pak yang kita serahkan misalkan 9.000.000 tapi ternyata bank hanya menyalurkan sekian juta. Masalahnya macam-macam yang tadi disampaikan, saya sampaikan di antara salah satunya. Nah data bulan ini yang kita rapatkan di Minggu ketiga bulan, bulan ini itu akan menjadi input untuk data bulan berikutnya, ini untuk mengantisipasi kalau terjadi meninggal, pindah, kemudian datang dan untuk mengantisipasi kalau terjadi bencana. Jadi kejadian bencana, makanya nanti kita minta *space*, minta *space* sekian untuk kita kembalikan kepada daerah kalau terjadi bencana kita bisa masukan itu. Usulan data DTKS jadi ada informasi publik, jadi nanti semua bisa melihat prosesnya mulai RT/RW dan sebagainya. Itu kemudian.

Kemudian mungkin saya juga mohon izin saya, saya terus terang kemarin itu untuk antisipasi pak supaya tidak masuk di ranah pidana. Jadi saya tidak ingin saya janji membetulkan, karena sebetulnya tiap tahun itu pemeriksaan itu ada temuan itu ada terus. Sebetulnya saya mantan PNS bukan hanya Walikota, saya mantan PNS, sebetulnya kalau ada temuan ini harusnya diperbaiki, tahun berikutnya sudah harus diperbaiki tapi yang terjadi didiamkan saja pak, terus terang saya mumet, saya harus menyelesaikan mulai 2015 ini pak, jadi-jadi seperti itu.

Karena itu kenapa saya dului saya mohon-mohon maaf kalau ada yang kurang berkena, tapi tidak ada demi Allah tidak ada niat apa pun, saya sebetulnya ke BPKP itu lebih sering pak. Karena di BPKP itu punya dashboard lengkap Pak, yang masuk ke tempat kita, ke data kita, kenapa? Saya tidak ingin saya masuk kesini kondisi psikis teman-teman itu sudah down sekali Pak, diajak ngomong susah. Jadi kenapa kemudian saya dului, saya sampaikan tolonglah ini saya betulkan. Saya janji untuk membetulkan dan kita bicara di setiap prosesnya itu dengan Kejaksaan Agung, dengan kita punya rekaman semuanya dengan polisi di kepolisian, dengan KPK dengan BPKP, dengan ke sana 4 itu lembaga itu dengan OJK, dengan BI. Kami selalu ini data undangannya jadi ini rutin saya lakukan tiap-tiap bulan. Jadi kenapa saya sekali lagi mohon maaf tidak ada niat apapun tapi saya pengen iya saya sampaikan kalau kita bisa perbaiki kenapa tidak? Kenapa saya harus kemudian sebagai menari-nari di atas penderitaan orang lain? Saya tidak mau seperti itu.

Nah kemudian saya juga mohon izin Pak, untuk e-Warong itu akan saya hapus, karena kemarin saya melihat sendiri pak dengan pak Menko, di e-Warong di Solo itu saksinya Pak Dirjen ini. Itu masyarakat membeli telur 1 kilo Rp27.000,-. Di depan, di depan jaraknya jalannya 3 meter Pak, Pak Sekjen ada jual, ditulis dijual dijual telur dalam bentuk grosir ternyata minimal setengah kilo, jadi grosir tapi minimal setengah kilo, terus saya tanya, saya ngomong lho kok naiknya banyak, kemarin itu Rp18.000,- kenapa jadi Rp27.000,- Bu kita ngambilnya Rp26.000,-. Nah kemudian saya jalan di depan saya baca-baca poster, terus saya tanya ke ibunya yang jual Bu berapa telur Rp18.500,- artinya perbedaan orang miskin dia membeli lebih mahal karena kita menetapkan di tempat itulah harus beli. Dan ini Pak

*nyuwun sewu* saya sudah, dengan Kejagung saya sudah 4 kali pak, inspektur ya menemukan ini pak, ada yang saya berhentikan sebagai apa, PKH, ada yang itu.

Jadi kita sudah mohon maaf saya tidak laporkan karena ini juga supaya teman-teman saya di kementerian ini tenang dulu pak, jadi seperti itu. Jadi seperti itu jadi nanti kita lagi siapkan untuk e-Warong itu siapa pun bisa menjadi tempat membeli dia, kita lagi siapkan aplikasinya dengan handphone saja nanti. Jadi pembeli itu, penjual itu tinggal klik-klik begitu kemudian report itu masuk ke kita seperti itu pak, karena kalau kita kondisikan itu terus terang seperti itu, jadi saya mohon izin itu.

Jadi hasil rapat koordinasi kami bulanan pak, ya rapat koordinasi kami setiap bulan itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf tidak ada niat apa pun di saya, tapi saya ingin bahwa ini bisa diselamatkan dengan cara kami membetulkan prosesnya. Dan alhamdulillah saat mereka kita sampaikan bahwa kami menemukan begini, mereka juga menyatakan, itu bu yang kami tunggu, katanya seperti itu. Ada rekamannya semua.

Saya kira begitu terima kasih mohon maaf sekali kalau ada yang kurang berkenan saya akhiri.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Bu Menteri Sosial Republik Indonesia ya yang sudah sangat detil panjang lebar menyampaikan paparannya sesuai dengan agenda hari ini. Kami tegaskan lagi Bu Menteri ini merupakan tindak lanjut dari rapat gabungan tanggal 1 Juli 2020 Bu, jadi di sini pernah rapat 5 menteri Bu. Ada Menteri Desa, ada Menteri Bappenas, ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Ya masalah DTKS ini pak Sekjen ya, saya kira ini bentuk dari tindak lanjut rapat gabungan tanggal 1 Juli 2020 yang salah satu kesimpulan itu memang Bu harus dengan Dukcapil Bu. NIK tunggal dan itu sudah Bu Menteri lakukan tadi. Nah oleh karena itu mungkin di media kita dengar 21.000.000 dihapus, tapi sekarang ditidurkan istilahnya ya bukan dihapus ya.

#### **MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA (TRI RISMAHARINI):**

Kalau dihapus nanti keluar lagi bisa Pak, kalau dihapus keluar lagi misalkan meninggal tadi yang saya sampaikan, itu bisa keluar lagi. Kalau enggak, kalau dihapus justru. Karena kemudian,

**KETUA RAPAT:**

Kalau tidur tidak bisa bangun lagi ini Bu.

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA (TRI RISMAHARINI):**

Kenapa?

**KETUA RAPAT:**

Kalau tidak berarti tidak bisa bangun lagi.

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA (TRI RISMAHARINI):**

Tidak bisa bangun tapi harus pakai SOP gitu, pakai SOP dia bisa bangun tapi harus pakai SOP.

**KETUA RAPAT:**

Istilahnya begini Bu, makanya ini perlu kita *clearkan*, karena di publik itu disampaikan 21.000.000 itu dihapus, sekarang kita.

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA (TRI RISMAHARINI):**

Tidak saya tidak pernah menyampaikan itu, saya menyampaikan ditidurkan, iya ditidurkan karena.

**KETUA RAPAT:**

O tidak pernah ya Bu? Ditidurkan Bu. Jadi di media ini perlu disampaikan.

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA (TRI RISMAHARINI):**

Tidak saya tidak pernah ngomong dihapus, karena saya tahu justru kalau dihapus itu malah bahaya pak, itu bisa keluar lagi, itu persis kejadian yang meninggal itu. Dulu setelah meninggal itu dihapus datanya, kemudian

dia gunakan lagi untuk *mbobol* bank.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik Bu Menteri kita persilakan para Anggota termasuk dari meja pimpinan, yang menjadi pertanyaan besar tadi Bu, dari tahun 2015 banyak temuan tapi ini tidak ditindaklanjuti. Dan jujur Bu Menteri baru ini Komisi VIII mendapatkan laporan seperti ini Bu jadi secara detil, berapa yang NIK ganda dan sebagainya itu baru ini, itu pun hasil dari rapat gabungan kira-kira begitu Bu. Jadi kita sepakat Bu Menteri untuk mengakhiri silang sengkabut data ini Bu, karena kalau benar datanya saya katakan dari awal tadi in sya Allah republik ini bisa tertib Bu ya.

Baik, mulai dari PDIP siapa? Tadi Bu Selly ya, Bu Selly kita per fraksi dulu ya, Bu Selly kemudian dari Golkar Bu Endang apa Pak HBA. Pak HBA ya, oke, dari Gerindra Pak Husni, dari Demokrat Pak Nanang, dari PKB Pak Maman atau Pak Nurul Huda? Pak Maman ya nanti bisa kita buka putaran lagi, yang penting jangan nanya setelah itu tidur, itu enggak boleh didata ditidurkan juga nanti, enggak dijawab sama Bu Menteri.

Baik Fraksi PKS eh *sorry* Nasdem Bu Delmeria ya? Ya enggak bukan pimpinan yang nunjuk nanti kita putar lagi ya, takut saya tadi ada kapoksinya masalahnya, kapoksinya tidak datang kan? Saya lihat kan kaya Pak Nanang Kapoksi itu Banggar tapi kapoksinya Pak Wachid kalau Gerindra kan tapi dikasihkan Pak Husni gitu kan? Saya hapallah kalau Komisi VIII itu. Fraksi PAN Pak Rizal ya, PPP atau dari daring nanti kita tanya Pak Kyai Muslich atau Pak lif, PKS tadi siapa? PKS belum ya, ibu Nur Azizah oke.

Baik kita mulai sesuai dengan Peraturan yang berlaku di DPR tegas, padat, jelas *to the point* kemudian waktunya paling lama 5 menit, lebih dari itu saya ingatkan. Silakan Bu Selly.

#### **F- PDIP (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

Yang saya hormati Ibu Menteri beserta jajaran.  
Pimpinan beserta Anggota Komisi VIII.

Hari ini saya betul-betul harus menyampaikan permohonan maaf kepada Kementerian Sosial khusus kepada Ibu Menteri, karena apa yang menjadi pemikiran kita semua tentang apa yang dikerjakan oleh Kementerian Sosial selama satu masa persidangan kemarin yang membuat kita bingung setidaknya apa yang dikerjakan oleh Kementerian Sosial tanpa berkoordinasi dengan Komisi VIII terjawab sudah. Dan ini menjadi catatan saya yang membuat saya apresiasi kepada Kementerian Sosial begitu susahny kita

mengurus DTKS dari bulan Juli tahun 2020 hanya dengan tangan dingin seorang Menteri Sosial akhirnya bisa diselesaikan dalam satu masa persidangan.

Dan ini membuat saya akhirnya harus menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Sosial dengan dikeluarkannya new SIKS-NG yang betul-betul atau new DTKS yang betul-betul kita inginkan bagaimanapun juga integrasi antar satu bantuan ke bantuan lain itulah yang kita inginkan. Kemudian 21.000.000 data yang ter-*hold*/ditidurkan tadi itu sudah terjawab sudah, sehingga inilah yang harus kita sampaikan kepada pemerintah daerah terutama kepada konstituen kita yang ada di daerah yang menyatakan kenapa data kami tidak muncul. Kenapa data kami hilang? Padahal sebetulnya ada, ada miss komunikasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Sosial.

Yang menjadi catatan saya Pimpinan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Menteri ada 2 pendekatan paradigma, pertama adalah paradigma strategis, bagaimanapun juga DTKS ini merupakan rujukan untuk kementerian dan kelembagaan. Kemudian data ini sifatnya holistik dan dinamis artinya bisa berubah-ubah kapan pun saja. Kemudian pendekatan kedua adalah pendekatan birokrasi teknis. Tadi disampaikan oleh Ibu Menteri adalah pendekatan birokrasi teknis, bagaimanapun juga saya ingin menyampaikan kepada Ibu Menteri turunan dari Undang-Undang 13 tahun 2011, kemudian kita asumsikan dan kita sandingkan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, itu menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan.

Bahwa tadi disampaikan oleh Ibu Menteri mengenai DTKS yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, dan itu merujuk kepada aturan Permendagri eh Permensos Nomor 9 Tahun 2018. Dan sangat jelas di dalam Undang-Undang 23 tahun 2004 mengenai Pasal 282 dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai oleh APBD. Termasuk di dalamnya Permensos Nomor 9 tahun 2018 mengenai standar pelayanan minimum. Standar pelayanan minimum yang harus dibiayai oleh APBD salah satu bidangnya adalah bidang sosial. Dan seperti kita ketahui bidang sosial yang menjadi kewenangan kabupaten/kota harus melayani kebutuhan dasar dari kebutuhan masyarakat, salah satunya tadi mengenai yang disampaikan oleh Ibu Menteri mengenai difabel, kemudian anak telantar, kemudian mengenai tuna sosial, dan yang terakhir mengenai korban bencana.

Tetapi di dalam Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tadi Bu Menteri yang tadi ibu sampaikan, apakah masih memungkinkan kita akan merubah aturan Permensos? Menurut saya harus dirubah karena tidak jelas, di dalam permensos tadi tidak dimasukkan mengenai verifikasi data termasuk dengan Puskesmas. Kalau ini masuk menjadi bagian dari Permensos tadi, maka saya yakin APBD kabupaten/kota mereka akan menganggarkan dana pendampingnya dari APBDnya masing-masing. Karena ada payung hukum yang menyampaikan mengenai standar pelayanan minimum mengenai ke bidang sosial salah satunya mengait verifikasi data dan mungkin dana pendampingan untuk Puskesmas.

Saya sampaikan Pimpinan selama ini Puskesmas yang ada di kabupaten/kota tidak semua pemerintah kabupaten kota atau desa mempunyai Puskesmas. Maka ini harus ditegaskan oleh peraturan yang memang lebih tinggi bahwa pemerintah kabupaten/kota juga harus serius untuk meminta pemerintah desa menyiapkan tenaga-tenaga Puskesmas. Kemudian tenaga Puskesmas yang sudah ada pun selama ini mereka keberadaannya tidak diperhatikan dengan baik, tidak ada insentif ataupun perhatian dari pemerintah daerah, sehingga inilah yang menyebabkan kenapa data DTKS yang ada di pemerintahan kabupaten/kota ini agak terhambat masuk ke pemerintah pusat.

Kemudian yang menjadi catatan saya apa Ibu Menteri saya setuju dengan apa yang disampaikan Ibu Menteri mengenai dashboard khusus mengenai program-program bantuan dari Kementerian Sosial. Karena selama ini kalau kita mengetahui dashboard yang harusnya kita pemerintah daerah atau pemerintah daerah khususnya di desa mereka mengetahui program bantuan BPNT siapa saja sih yang berhak menerima? Kemudian apa yang harus mereka terima itu yang tidak pernah ada, bahkan e-Warong yang ada di daerah tidak pernah *dashboard* mengenai apa yang menjadi bagian dari e-Warong yang disiapkan di tempat mereka. Tetapi saya masih agak menjadi pertanyaan saya mengenai kerja sama antara Kementerian Sosial dengan bank himbara yang menyangkut dengan *dashboard* tadi yang minya menggunakan fiber *optic*, karena tidak semua kabupaten/kota mempunyai fiber optik. Sehingga mungkin harus menjadi perhatian dari Kementerian Sosial apakah kita bisa bekerja sama dengan *provider*, karena banyak provider-provider komunikasi yang mereka mempunyai jaringan fiber optik yang ada sudah memadai.

Dan yang terakhir mungkin Pimpinan yang ingin saya pertegas mengenai verivali data tadi yang disampaikan itu oleh Ibu Menteri, apakah sebaiknya SKB 3 menteri atau SKB Kementerian Dalam Negeri, kemudian dengan SKB Kementerian Sosial, yang menyangkut dengan percepatan pemutakhiran data yang sudah dibuat tadi memaksa untuk memaksakan Pemda kabupaten/kota *punishment*-nya ini seperti apa Ibu Menteri? Karena kalau kita bicara dari SKB tadi jelas-jelas DAK maupun DAU/DAK-nya akan diberikan semacam *punishment*.

Dan yang terakhir Pimpinan kalau saran saya kepada Ibu Menteri, apakah memungkinkan dari Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan DAK non fisik kepada pemerintah kabupaten/kota? Karena pemerintah kabupaten/kota dengan keterbatasan anggaran, kemudian keterbatasan SDM, kemudian teknologi sarana prasarana mereka sangat membutuhkan sekali bantuan dari pemerintah pusat, sehingga memang menjadi rujukan kita apabila kita bisa memberikan DAK non fisik kepada kabupaten/kota, agar bisa menyeragamkan apa bentuk keinginan kita mengenai DTKS. Kemudian SLRT pun mungkin Ibu Menteri, SLRT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program Kementerian Sosial, karena kalau hanya 80 kabupaten/kota per tahun, saya pikir 2 periode Presiden itu baru akan selesai. Maka mungkin harus menjadi catatan kita mengenai SLRT tadi, terima kasih.

*Wassalu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

## **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumussalam Warahmattullaahi Wabarakatuh.*

Kasih Ibu Sely dari PDIP. Kita lanjutkan ke Golkar silakan pak Hasan Basri Agus atau lebih terkenal HBA.

## **F-PG (Drs. H. HASAN BASRI AGUS, M.M.):**

*Bismillahirohmanirrohim,  
Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh,*

Yang kami hormati Pak Ketua dan Bapak Ibu Wakil Ketua, rekan-rekan Anggota Komisi VIII,  
Ibu Menteri para Eselon 1 dan seluruh staf.  
Bapak ibu sekalian bahagia.

Pada kesempatan ini saya izin memperkenalkan diri Bu, baru pertama kali ikut rapat Bersama Menteri saya baru pindah 1 April kemarin ke Komisi VIII, yang dulu Komisi V. Dan saya anak buah Pak Ace dari Golkar, dari Jambi Bu. Ada berapa hal yang saya tanggapi dari apa yang disampaikan ibu Menteri tadi, pertama saya memberikan apresiasi, rencana ibu untuk menuntaskan masalah data kemiskinan dan persoalan sosial di desa-desa ini. Dan kami melihat setelah kami lihat dari *paper* atau makalah yang ibu sampaikan ini, untuk Jambi ada 2 atau 3 kabupaten yang belum masuk, dan itu menjadi catatan kami juga nanti di situ kami tegur masing-masing daerah yang tidak masuk.

Kemudian yang perlu ibu tahu bahwa begitu kami duduk di Komisi VIII, kami langsung waktu reses kemarin rapat dengan dinas sosial di provinsi dan termasuk perangkat ibu yang ada di daerah. Mulai dari pendamping PKH, karang taruna dan sebagainya. Kami ingin mencatat dan menangkap persoalan-persoalan sosial yang ada kaitannya dengan tugas saya sebagai partner kerja daripada Ibu Menteri Sosial. Yang kami lihat bahwa yaitu ternyata dari verifikasi data kabupaten ada berapa kabupaten yang cuma menganggarkan dalam APBD, yaitu Kabupaten Batang hari dan kabupaten Tanjab Timur yang lain itu tidak menganggarkan. Oleh sebab itu menurut Dinas Sosial kita ragukan kevalitan data yang disampaikan, namun demikian untuk sementara pegangan kita saya pikir itu tidak menjadi satu masalah, yang penting tidak ada upaya kita untuk memperbaiki, itu pertama.

Yang kedua Bu, ya kami melihat bahwa dalam rangka verifikasi data ini memang kita perlu juga kehati-hatian, kalau kita memegang data dari pak kades mengambil laporan, pak kades ini kan ada juga tim sukses dan suksesnya, kadang-kadang itu mana yang tidak mendukung kades itu tidak dimasukkan dan tidak dikasih bantuan kepada mereka. Nah ini persoalan juga Bu ini, persoalan yang ada di lapangan. Saya mengusulkan kalau bisa ibu, sudah kita perkuatkan perangkat kita bu, perangkat sosial yang ada di

kecamatan, saya melihat di kecamatan itu ada perangkat ibu TKSK dan TKSPD. Tenaga kerja sosial kecamatan dan tenaga sosial disabilitas di kecamatan itu 2.

Belum lagi ada PKH kalau untuk Jambi PKH-nya 542 orang, ada yang kabupaten dan ada yang di provinsi. Dan dua tenaga sosial ibu yang di kecamatan ini, itu honorinya cuma Rp500.000,- yang TKSK dan TKSPD Rp800.000,- itu dibawah UMR. Kenapa tidak disatukan saja? Satu orang petugas sosial kita di kecamatan, setiap kecamatan se-Indonesia cukup 1 orang, gajinya bisa di atas UMR. Jadi ini lebih-lebih mantap lagi saya pikir untuk ke depan, dan mereka kita harapkan tidak terkombinasi masalah politik. Jadi kerjanya memang betul-betul mengurus masalah sosial, sebab mengurus ibu nih pekerjaan sosial ini pekerjaan yang sangat besar dan rumit itu, untunglah ibu ini mantan kepala daerah jadi mengerti betul persoalan yang banyak, dan biasa menghadapi persoalan yang banyak.

Belum lagi kita berpikir masalah-masalah orang gila yang di pasar yang tidak diurus, belum lagi orang sakit sudah menahun tidak punya kemampuan, dan banyak hal-hal lain. Orang tua jompo Bu, sekarang juga harus jadi perhatian kita juga orang jompo ke depan ini, di Jepang jompo sudah jadi perhatian dan kita ini sudah banyak yang tua yang tidak terurus oleh anak-anak yang ada di desa maupun di kota. Itu pertamanya, jadi menurut hemat kami untuk mengurangi supaya jangan ada kepentingan politik masuk, ya mungkin ke depan perlu menjadi pemikiran ini bu. Dan ini menjadi PR ibu juga mungkin menurut kami ke depan, banyak sekali persoalan ini tapi menarik Bu, ini tantangan bagi ibu dan insyaAllah ini pahalanya besar sekali. Insyaallah kalau ibu mengurus orang-orang seperti ini Allah akan mengurus ibu dan keluarga ibu insyaallah, yang penting kita ikhlas bu.

Kemudian yang selanjutnya, itu masalah PKH, kalau PKH ini saya lihat gajinya sudah cukup besar, ada yang Rp3.000.000,- yang tingkat di bawah desa, kecamatan, kemudian koordinator kabupaten Rp4.000.000,- dan provinsi Rp5.000.000,- saya pikir itu sudah cukup. Tapi yang tadi petugas ibu sendiri yang di kecamatan belum jadi pemikiran Ibu ke depan. Ibu Menteri itu berapa hal sekedar mungkin satu kali ini rapat dengan Ibu memperkenalkan diri saya insyaAllah tertarik, dan betul-betul menarik saya untuk mengurus sosial ini. Banyak persoalan nanti ke depan akan kami laporkan, kalau hari ini karena kaitannya dengan verifikasi itu saja dulu terima kasih. Terima kasih Ketua dan Wakil Ketua.

*Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

## **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih pak Hasan Basri Agus, kalau ini mantan Gubernur Jambi bu jadi pahami kalau masalah-masalah yang begini. Baik kita lanjutkan ke Gerindra silakan Pak Husni.

**F-P GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):**

*Bismillahirrohmanirrohim,*

*Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh,*

Yang saya hormati Pak Ketua Komisi VIII dan jajarannya.

Yang saya hormati saya banggakan saya sayangi Ibu Menteri sosial dan seluruh jajarannya.

Yang saya hormati teman-teman Komisi VIII.

Pak ketua saya putar dulu dari belakang, tadi Ibu Menteri pertama menceritakan ada e-Warong ya Bu ya, ibu mau hapus, saya mohon maaf bu saya lihat ibu ini kenapa kok emosional betul, satu laporan bisa menghancurkan satu republik ini Bu? Kenapa saya bisa katakan begitu ya bu ya, saya ini orang lapangan Bu saya e-Warong saya turun, saya ke PKH saya turun, kemana-mana saya juga turun Bu. Gara-gara harga perbedaan harga satu telur di satu tempat dengan e-Warong langsung berani mengatakan akan ditutup e-Warong, tapi coba lihat sebab akibat itu Bu ya. Pertama apakah e-Warong itu ada titipan? Daripada si pendamping Bu ya, apakah itu ada titipan dari pada si kepala dinas sosial setempat? Pada bulan Januari saya pernah kirim berita untuk ibu tentang kejadian di Serdang Bedagai yang OTT bu, yang OTT itu dia, dia jadi pemasoknya. Kamu harus beli sekian harga dari saya kamu harus jual kesana,

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA (TRI RISMAHARINI):**

Sekarang lagi diperiksa itu pak.

**F-P GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):**

Saya tahu, sudah diputus Bu 6 bulan itu, dan enggak pantas itu ya. Jadi hal seperti itu ini harus jelas permasalahannya itu dimana, jadi jangan begitu lihat eh kamu mahal saya pedagang Bu, saya paham betul Bu jual beli, jadi kalau yang barang titipan ini siapa yang menitipkan, karena di lapangan ancam-mengancam itu biasa. Ya betul, ini, ini riil ya saya sudah laporkan kejadian itu di sama Pak Sekjen juga saya sudah laporkan, yah kalau kamu tidak mau beli di sini saya cabut PKH kamu, itu kejadian riil Bu di lapangan. Jadi jangan langsung serta-merta kita menyalahkan sebelah pihak, itu yang pertama, yah yang belakangan ini.

Kemudian ini mohon maaf Ibu Menteri yang saya sayangi tidak ada badai, tidak ada hujan, tidak ada apa pun tiba-tiba ibu datang ke KPK ada 21.000.000 yang hari ini ibu katakan ditidurkan. Enggak ada pembicaraan ibu sama DPR RI, sama kami Komisi VIII Bu. Mohon maaf Bu tidak ada,

sekarang itu kejadiannya di 2021, tahun 2020 siapa penikmat nih, 21.000.000 ini? Siapa penikmatnya? Apakah dari aparat pemerintah? Apakah juga dari apa, sih penerima manfaat yang ganda-ganda ini? Atau Himbara? Ibu Menteri saya Himbara saya turun semua Bu, waktu banyak para penerima PKH saat itu 2020 Pak kami enggak keluar duit kami, misalnya namanya Husni, H U S N I sudah di apa itu, di tanya Husni juga, tapi begitu keluar kartunya Husninya I menjadi y tidak keluar itu Bu. Iya tidak keluar, jadi saya melihat sebetulnya Himbara ini tetap melaksanakan kegiatan kehati-hatiannya, Cuma karena waktu itu kita Komisi VIII, kita bisa berkomunikasi yang mana bisa kita perbaiki, kita perbaiki, yang mana kita bisa pertanggungjawabkan kita juga akan mempertanggungjawabkan.

Kemudian juga Bu ya, tadi ibu mengatakan bahwa di 21.000.000 ini, ya ada PKH, BPNT dan BLT, ada yang tergabung dua, setahu kami Bu ya, setahu saya, saya juga rajin turun ke apa, ke para penerima manfaat, waktu tahun 2020 kita juga ada bagian yang disuruh untuk mendata kepada penambahan BLT saya ingat sekali itu ya. Jadi kita anggota DPR RI saat itu terjun ke lapangan Bu untuk mendata dan lain sebagainya, itu waktu diverifikasi di dinas sosial kabupaten/kota dobel langsung mereka coret. Jadi saya pikir di bawah itu datanya cukup bagus, cuma kenapa tiba-tiba dapat angka 21.000.000? 21.000.000 saya pikir Sumatera Utara pun tak sampai 21.000.000 itu penduduknya. Apakah 21.000.000 ini seluruh di republik ini?

Kemudian juga ini kendala di lapangan banyak sekali Bu yah, kami yang di Sumatera Utara waktu kami ketemu Himbara maupun PT Pos bahwa ada yang bantuan itu diantar langsung, ada yang seberang sungai bu, ada orang tua dan tidak bisa dia datang dan harus diantar, atau dilakukan pengecekan dan lain sebagainya. Sebetulnya banyak hal dan kendala-kendala yang di lapangan, saya mohon izin, mohon maaf sekali lagi ibu janganlah apa ya begitu kita mendengar sesuatu berita, langsung kita mengambil keputusan, karena Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi jangan ada satu tempat yang kita anggap tidak apa tidak layak atau tidak berkompeten langsung kita mengambil sebuah sikap.

Kemudian lagi ibu.

#### **KETUA RAPAT:**

Bisa dipersingkat pak?

#### **F-P GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):**

Kemudian Ibu Menteri yang meninggal pindah alamat, itu memang banyak terjadi, di tempat saya itu walikotanya 2020 tetap juga melakukan verifikasi data, tapi yang terima itu, itu juga. Yang sudah meninggal pun terima itu juga, jadi kita jangan pukul rata bahwa kita menyalahkan sesuatu pihak. Jadi jangan apa, diambil semuanya secara global, saya rasa itu saja

pimpinan terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT:**

*Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh*

Terima kasih Pak Husni dari Gerindra tadi kita sepakat sampai jam 12.00 WIB sekarang sudah lewat 5 menit.

Kita perpanjang Bu Menteri sampai jam 13.00 WIB bu ya. Setuju ya bapak, ibu?

**(RAPAT : SETUJU)**

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA (TRI RISMAHARINI):**

Bisa *nyuwun sewu* Pak, saya menerima Duta Besar Mesir mungkin bisa 12.30 WIB? Ya mohon maaf sekali terima Duta Besar Mesir Pak saya janji jam 13.00 WIB. Soalnya tadi siang juga selain itu saya juga menghadap Pak Presiden soal bencana Pak, 12.30 WIB itu bisa, setengah jam, saya mohon maaf sekali.

**KETUA RAPAT:**

Ya mungkin solusinya nanti bu kalau kita kasih kesempatan dulu, kalau sampai 12.30 WIB memang Bu Menteri harus meninggalkan ini, diharapkan ini nanti bersambung nanti ini Bu. Ya kita skors bu, kita cari waktu yang pas, karena kita sama komitmen kita untuk menuntaskan masalah data ini, ya gitu ya Bu.

Lanjut dulu ke pak Kyai Maman kami persilakan. Eh sorry, Nasdem ya Bu Delmeria dulu silakan.

**F-P NASDEM (Dra. Hj. DELMERIA):**

Terima kasih ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

Kami hormati Ketua serta Wakil Ketua beserta seluruh Anggota Komisi VIII. Yang kami banggakan Ibu Menteri beserta jajarannya.

Langsung saja barangkali karena Bu Menteri mau buru-buru 12.30 WIB, ada 4 hal yang singkat yang ditanyakan dalam hal ini, apa yang

disampaikan tadi 21.000.000 menidurkan data. Kami tidak *mudeng-mudeng* istilahnya Bu, istilah orang Jawa-nya. Data mana yang mau kita pakai di negara ini kok itu sama-sama warga negara juga yang miskin, data mana yang mau kita pakai BPS mendata, Dukcapil mendata, Kemensos mendata, Menteri Desa mendata, banyak data tapi kok tidak ada yang tuntas di negara ini. Kenapa dengan, harusnya ke depan kami berharap Bu Menteri punya kebijakan untuk menuntaskan data ini, jadi satu negara satu data. Jangan banyak benar data bingung kita, entar lain lagi, entar ditanya kesini lain lagi itu yang kami harapkan ke depan, jadi tidak lagi kalau semua data tersambung tidak ada data yang tidur kami rasa Bu, akurat semua jadinya, itu mungkin ke depan yang kami harapkan.

Yang kedua tentang apa yang disampaikan pak Husni karena kami sama-sama orang Medan barangkali Bu, mungkin ada nekad-nekadnya juga Medan apa gitu. Jadi sebenarnya e-Warong itu mungkin juga tidak salah, seperti yang pak Husni sampaikan tadi tidak, tapi yang nakal ini pendamping BPKH yang ibu SK-kan dari pusat itu Bu. Pendamping ini nakal dia mau mengancam warga masyarakat, karena masyarakat yang penerima manfaat di kita ini bu, masyarakat yang wawasannya kurang, miskin jadi BPKH ini mengancam kalau tidak diambil ke e-Warong itu nanti ibu bisa berhenti, jadi itu bahasanya. Di Dapil kami juga seperti itu Bu diancam Bu, jadi diancam harus belanja ke warung itu kalau tidak nanti tidak dapat lagi, tidak dapat bantuan lagi, jadi mengancam gitu. Pendamping BPKH itu juga harus, ya pendamping itu juga harus ya dikasih dievaluasi gitu Bu, ya harus ada pelatihannya dan harus dievaluasi gitu.

Terus ada juga kekecewaan-kekecewaan daerah Bu, diusulkan kepala daerah beberapa BPKH yang untuk kabupaten/kotanya, tapi yang turun ke bawah bukan apa yang diusulkan, berbeda dengan apa yang mereka usulkan. Ini kerjaan siapa bu? Kerjaan siapa ini, gitu? Yang diusulkan oleh kepala daerah, kepala daerah mungkin aspirasinya sudah ditampung dari kecamatan, dari RT/RW, kecamatan gitu, tapi sampai diusulkan ke kementerian yang keluar itu lain gitu. Mungkin itu yang kami tanyakan bu untuk singkatnya saja, lain waktu nanti mungkin kalau ada di Panja akan kita bahas lebih detail karena kami di Panja data kemiskinan dan verifikasi data kemiskinan.

Sekian terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bu Delmeria dari Nasdem, ya intinya Bu Menteri itu mau membenahi jangan sampai orang miskin jangan sampai ditekan lagi harganya. Kira-kira begitu Bu Menteri ya, supaya tidak lebih mahal, nanti mau diatur Bu ya sedemikian rupa sehingga penerima manfaat itu tidak terdesak atau terpaksa membeli barang yang mahal, kira-kira begitu. Kami lanjutkan kami persilakan kepada fraksi PKB Kyai Maman Imanul Haq silakan.

**F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi VIII.

Ibu Menteri Sosial beserta seluruh jajaran Eselon I dan semua yang hadir.

Saya Maman Imanul Haq dari Dapil Jabar IX, Subang, Sumedang, Majalengka Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Jadi ada sebuah nasehat kuno Bu Risma yang mengatakan bahwa kebenaran yang tidak terverifikasi itu akan menjadikan orang yang menyampaikannya itu menjadi pahlawan besar, tapi sebaliknya bisa menjadi penjahat besar. Nah itu semua yang saya melihat dari pertarungan kita hari ini ketika ibu datang ke KPK dengan 21 data fiktif dan kita harus verifikasi apa yang disebut dengan data itu, ibu telah melakukan aksi heroisme yang individualistis. Ini perlu dicatat, nah oleh sebab itu Bu, perlu penjelasan yang lebih komprehensif terutama ke publik Bu Risma, apa yang disebut dengan fiktif, apakah dia pihak yang tidak berhak?

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Mohon maaf pak saya tidak pernah ngomong fiktif. Saya tidak pernah menyampaikan fiktif.

**F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ):**

Oke, tetapi ini bu kalau ibu baca di online, bahasa itu disanggahkan ke Ibu.

**MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Maaf saya tidak pernah menyampaikan itu, saya hanya menyampaikan menidurkan, tidak pernah ngomong, justru data itu ada bukan fiktif.

**F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ):**

Oke ini yang harus dijelaskan ke publik, secara ini Bu, secara jelas sekali lagi apakah itu pihak yang tidak berhak tapi tercantum, atau apakah ada duplikasi data penerima itu harus dijelaskan.

Yang kedua publik lalu menilai, apakah ini cara Mensos baru ini untuk

cuci tangan dan bersih, atau bersih-bersih Kemensos? Ini tentu yang saya dorong berkali-kali fraksi Kebangkitan Bangsa soal reformasi birokrasi, soal validasi data, dan soal komunikasi, ini harus *clear* dulu. Nah konsekuensinya dan ini sangat membahayakan bahwa 21.000.000 data ini termasuk yang kita sepakati DPR dan Kemensos, lalu anggaran itu kalau di hall kenapa tidak lalu dialihkan misalnya ke DAK misalnya, itupun harus dijelaskan kepada publik, tidak lalu seolah-olah ini ada 21 data lalu diberikan ke KPK kenapa tidak lalu komunikasi dengan DPR RI, mitra strategis ibu? Karena kami bertanggungjawab juga untuk tahu persis pertanyaan dari konstituen, pertanyaan dari media.

Nah lalu setelah itu 21.000.000 data ini, itu kenapa menjadi persoalan? Bagaimana dengan nasib di anggaran selanjutnya? Pertanyaan ini harus betul-betul kita jelaskan sehingga bahasanya harus mulai jelas bu Risma. Tadi sudah jelas bahwa ini tidak dihapus tapi ditidurkan itu yang harus dipegang. Bahwa ini dilaporkan ke KPK, bukan diminta KPK saya mencatat tiga kali ibu ada kalimat diminta KPK. Nah bahasa-bahasa itu sebagai pejabat negara kita harus betul-betul hati-hati, karena itu akan menjadi santapan publik, menjadi perdebatan. Padahal saya yakin Komisi VIII dengan Ibu dan teman-teman Kemensos punya tujuan yang sama soal validasi data, soal bagaimana kemiskinan ini tidak dijadikan komoditas, sekali lagi berkali-kali kita mengomongkan kemiskinan, tapi kemiskinan dan orang miskin dijadikan komoditas dan bancakan oleh begitu banyak orang, sehingga korupsi begitu besar.

Nah itu pertanyaan yang menurut saya harus dijawab betul-betul dengan salah satunya memperbaiki komunikasi, baik komunikasi dengan DPR ataupun komunikasi ke publik itu sendiri. Apa yang dikatakan pak Husni harus menjadi catatan juga bahwa seorang menteri tidak hanya bergerak secara heroisme individualistis dan agak emosional, tetapi lebih kepada bagaimana kebijakan itu betul-betul dibangun secara sistematis, rasional, dan juga evaluatif yang jelas sehingga rakyat tahu bahwa ibu bekerja betul-betul untuk mengentaskan kemiskinan dan tidak ada pemiskinan secara terstruktur dan sistematis. Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

#### **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih pak Kyai Maman Imanul Haq dari PKB. Berarti kita tampung dulu pertanyaan ya Bu, nanti kita agendakan lagi ibu dan jajaran bisa menjawab lebih lanjut Bu, ya.

Baik kita lanjutkan ke Fraksi Partai Demokrat, kami persilakan pak Nanang Samodra.

**F-PD (Ir. H. NANANG SAMODRA, KA., M.Sc.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati.  
Ibu Menteri Sosial beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini.

Ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan yang pertama begitu terkejutnya saya membaca di media bahwa 21.000.000 data yang tidak jelas yang disampaikan oleh Ibu Menteri ke KPK. Nah hal ini banyak yang bertanya baik secara langsung melalui WA, SMS dan tatap muka menanyakan apa sebenarnya terjadi kepada saya? Ya saya hanya bisa menjelaskan bahwa masalah data ini carut marut dari sejak lama, karena dulu kita menggunakan data kemiskinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, tiba-tiba di *veto* oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan data BPS. Kita tahu semua bahwa data BPS itu basisnya makro, dan mereka menggunakan data berbasis rumah tangga, sedangkan data yang dibuat oleh Kementerian Sosial adalah data mikro dan basisnya KK.

Nah perbedaan inilah yang membuat mungkin ada perbedaan, jadi walaupun ada pertanyaan-pertanyaan masyarakat menanyanya seolah-olah terjadi sesuatu manipulasi atau apa yang besar disitu, sehingga menyebabkan kita semua seolah-olah tidak bekerja, itu yang sulit saya menjawabnya. Mereka menyerang saya lagi, pak faktanya yang seharusnya menerima mereka tidak menerima, sebaliknya yang tidak berhak justru itu yang menerima, dan itu kejadiannya bukan hanya didaerah Dapil kami saja, merata ke seluruh Indonesia pada saat kita melakukan kunjungan-kunjungan.

Jadi kalau saya melihat saya mencoba menyimpulkannya sendiri bahwa data ganda itu mungkin terjadi pada saat keadaan *first* mayor kemarin, jadi pada saat itu semua pihak memberikan bansos, baik internal Kemensos, Pemda, baik provinsi maupun kabupaten dan donator-donatur lainnya. Nah mungkin itu yang dicatat sehingga terkesan ganda, padahal saya ingin fokus bahwa hanya internal Kemensos yang sekarang oleh Ibu Menteri Sosial hanya difokuskan pada BPNT dan PKH saja, saya setuju Bu untuk dirampingkan lagi.

Kemudian dengan adanya data ganda tadi masyarakat bertanya, berarti kalau data itu belum tersalurkan mengendap di Himbara katanya. Nah Himbara sendiri sepengetahuan saya itu makhluk ekonomi, apapun mereka berusaha mengendapkan uangnya itu di bank-nya selama mungkin. Nah saya juga ingin mengecek, apakah temuan dari BPK mengenai bahwa dana-dana yang di Himbara itu apakah sudah ditarik atau belum, itu juga saya ingin mendapatkan progresnya seperti apa?

Kemudian berbicara mengenai kemiskinan, sepengetahuan saya setiap daerah itu mempunyai kriteria yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Saya ambil contoh di Maluku semiskin-miskinnya orang itu pasti punya jas, karena mereka sangat-sangat bergengsi kalau pesta itu harus pakai jas. Di kampung saya di NTB walaupun punya kerbau 10, 20 mungkin bajunya cuma satu, karena ya sudah terbiasa seperti itu di lapangan. Jadi kriteria miskin ini mungkin kita klasifikasikan per daerah itu ada

semacam kearifan lokal, sehingga masyarakat lokal yang menentukan, siapa yang pantas miskin dari aparat pemerintah paling bawah kepala dusun atau ketua lingkungan yang ada di daerah yang bisa menentukan bahwa miskin itu siapa, dan saya yakin ibu sudah punya pengalaman banyak tentang ini. Nah sayangnya data-data kriteria miskin ini tidak selaras dengan data-data yang ada di Kementerian Sosial, karena Kementerian Sosial punya data yang baku.

Kemudian di dalam masalah data-data miskin ini saya berharap ada perbaikan-perbaikan dan kelihatannya mengarah kesana, mudah-mudahan didalam pendataan ini, bisa lebih baik. Kalau Ibu bergerak di tataran pusat, kalau saya menyoroti di tataran daerah, sebagai contoh, masyarakat sendiri khususnya yang menerima bantuan baik PKH maupun BPNT ini, enggan untuk graduasi. Mereka kalau sudah nyaman menikmati bantuan itu seolah-olah itu wajib setiap saat mereka akan menerima, oleh karena itu ini juga perlu di evaluasi.

Kemudian perilaku petugas entry data yang selama ini saya tahu di kecamatan, seringkali mereka "dititipi" dititipi oleh Kepala Desa, atau aparat-aparat dinas sosial setempat, atau para politisi yang terkadang petugas ini karena mungkin honorinya rendah atau apa, atau tidak punya tanggung jawab secara khusus hanya karena mengerti komputer berarti bisa untuk entry data sehingga diminta untuk entry data. Nah saya tidak heran kalau data-datanya salah tadi ada ibu IT namanya ada nul-nul dan sebagainya, itu ya karena proses dalam entri data. Mudah-mudahan software-nya sudah diperbaiki sehingga tidak terjadi lagi data-data yang dobel tadi.

Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh penanya yang lain perilaku pendamping PKH, tolong Bu dievaluasi, karena mereka itu sangat dominan pendamping PKH ini, seolah-olah merekalah yang paling berjasa kepada PKH ini dan menakut-nakuti, menggertak supaya mengikuti dengan apa yang mereka mau. Beberapa dan Anggota DPR pun bisa kalah sama pendamping PKH ini, faktanya di lapangan seperti itu Bu. Nah mohon ini juga ada semacam evaluasi, untuk pendamping PKH ini sehingga ini jelas siapa-sapa yang mendapat, ya memang kami menyadari bahwa batas yang miskin dan tidak miskin itu sangat tipis di era sekarang ini. Oleh karena itu penentuan ini jangan semata-mata hanya dari petugas PKH saja yang menentukan, tapi juga ada unsur lain mungkin tokoh masyarakat setempat juga bisa dilibatkan untuk menentukan ini.

Saran kami untuk menghindari adanya siapa yang berhak menerima tetapi di tidak menerima atau yang menerima tetapi yang harus menerima tetapi tidak menerima namun sebaliknya yang tidak berhak tapi dia menerima, itu setelah di-SK-kan oleh Kementerian Sosial, bisa didelegasikan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk boleh melakukan revisi. Karena selama ini kalau sudah namanya itu walaupun sudah meninggal ya tidak bisa diganti, faktanya seperti itu. Jadi harapan kami bisa direvisi, ditingkat kabupaten/kota dengan adanya revisi itu sangat mudah untuk melakukan perubahan-perubahan. Jadi dari Kementerian Sosial cukup mengalokasikannya sekian, cocokkan dengan data DTKS yang ada, dan nanti apabila ada perubahan mereka harus mengusulkan DTKS dulu baru disetujui perubahannya, tapi

waktunya jangan terlalu lama, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Waktu sedikit lagi kita manfaatkan Bu Menteri ya? Minimal pertanyaannya ditampung dulu, kami lanjut ke PKS, silakan Bu Nur Azizah Tamhid.

**F-PKS (Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.B.A.):**

*Bissmillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Ibu Menteri Sosial dan seluruh jajarannya.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi V dan seluruh jajaran dan seluruh Anggota Komisi VIII maaf keliru tadi.

Yang pertama ingin memastikan tadi sedikit disinggung oleh Pak Ketua atau Pimpinan, terkait bulan Juli 2020 pernah ada rapat gabungan antara Kemensos, Kemendagri kemudian Kemenkeu dan lainnya. Kemudian ibu menteri mengeluarkan apa namanya Peraturan Nomor 26 Februari tahun 2021, lha kemudian terkait ini maaf Bu Menteri apakah, kemudian masih diapa, diingat bahwa kalau tidak salah SKB tiga menteri antara Kemensos, kemudian Kemendagri dan Kemenkeu itu adalah verifikasi atau pemutakhiran data itu adalah kewajiban seluruh kepala daerah, bupati atau wali kota, dan setiap tahun itu diadakan pemutakhiran data dua kali, itu bulan April dan bulan Oktober. Itu yang seingat saya di SKB tiga menteri, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua terkait dengan pemutakhiran data atau verifikasi data ini memang penting, karena kalau tidak itu akan terjadi hal-hal yang tidak semestinya bisa dilakukan yang berhak tidak mendapat kemudian yang tidak berhak mendapat. Kemudian ini namanya na'udzubillah, kemudian tidak tepat sasaran, yang memang kalau saya perhatikan banyak permasalahan yang ada, yang pertama yaitu belum memadainya anggaran yang dialokasi untuk menjalankan kegiatan verifikasi validasi data. Anggaran yang dialokasikan untuk verifikasi, validasi data DTKS seringkali tidak memasukan perhitungan medan dan jarak tempat tinggal penerima manfaat, serta keterbatasan frekuensi angkutan umum untuk menuju tempat tinggal penerima manfaat. Kekurangan anggaran ini menjadi penghambat dan menjadi beban berat bagi petugas pendata dan verivali DTKS. Kedua masih belum memadainya jumlah, kualitas dan honor SDM petugas pendata dan petugas verivali DTKS. Oleh

karena itu pelatihan bagi petugas pendataan dan verifikasi perlu ditingkatkan untuk menekan kesalahan data penerima manfaat, termasuk terdaptarnya orang atau keluarga yang tidak layak dan seterusnya.

Yang ketiga belum terwujudnya sistem yang terintegrasi antara DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial dengan data kependudukan, yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Yang keempat belum memadainya perangkat dan logistik pendataan dan verifikasi, di area yang jaring telekomunikasi sering mengalami gangguan teknis menyebabkan transfer data menjadi terhambat. Oleh karena itu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perusahaan provider perlu mencari solusi untuk meningkatkan performa transfer data. Yang kelima belum jelasnya struktur organisasi, petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan dan SOP terkait kegiatan verifikasi DTKS, berbeda-beda daerah berbeda struktur dan pemahaman tentang pelaksanaan verifikasi data verifikasi data.

Oleh karena itu, ada saran yaitu pengalokasian anggaran yang memadai dan realistis untuk menjalankan kegiatan verifikasi, kemudian perlu pengelolaan jumlah, kualitas dan honor SDM yang dan petugas pendata dan petugas verifikasi data yang lebih layak. Dan sistem yang terintegrasi antara DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial, dengan data kependudukan yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Keempat meningkatkan perangkat dan logistik pendataan dan verifikasi, yang kelima penetapan struktur organisasi petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan dan SOP terkait kegiatan verifikasi DTKS.

Dan yang dikeluhkan dimasyarakat itu masa yang pandemic ini, kemudian memang masih carut marut pendistribusian bansos dan sebagainya yang konon disana itu di Komensos ini menerima apa data on line. Nah ini yang mengecewakan masyarakat. Jadi mereka pada mengeluh dan supaya ini distop jangan diikuti yang online, online mendaftarkan diri untuk menerima bansos.

Ini saja ibu Menteri, terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Bu Nur Azizah dari PKS, yang terakhir Pak Rizal dari PAN kami persilakan.

**F-PAN (H. MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.Si.):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VIII.

Yang kami hormati Ibu Menteri beserta jajarannya.

Pertama-tama kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bu Menteri, saya kira data ini memang harus betul-betul valid Bu. Karena memang banyak di kalau kita lihat apalagi yang ada di Dukcapil berbeda kemudian BPS berbeda, kemudian di beberapa tempat lain juga berbeda ini saya kira Bu Menteri harus kerja keras untuk melakukan sinkronisasi data dari berbagai kelembagaan yang ada, kami mengapresiasi yang pertama. Kemudian memang ya ibu mau tidak mau harus berani Bu, berani mengambil langkah-langkah yang ada, mungkin ada juga yang tidak suka dengan cara ibu seperti ini. Kami mendukung kalau bisa dituntaskan data-data kemiskinan ini akan sangat membantu masyarakat kita yang ada di bawah.

Kemudian yang kedua mengenai data memang di berita itu 21.000.000 itu ada yang mengatakan fiktif, ada yang mengatakan ganda tadi sudah banyak disinggung oleh bapak-bapak dan ibu yang lain. Ini sebenarnya kalau kami lihat Bu, di lapangan data ini sebenarnya pada saat pendataannya yang terjadi itu tidak ada mungkin semacam arahan kira-kira data yang mana yang diperlukan. Mereka mengambil berdasarkan data, berdasarkan penduduk saja, padahal penduduk yang punya NIK itu ada yang sudah kaya, ada yang masih miskin. Nah ini banyak juga terjadi seperti disampaikan tadi, yang kaya yang tidak berhak mendapatkan jatah ini, sedangkan yang berhak itu tidak mendapatkan. Ini kenapa ini semua terjadi? Sebenarnya kalau kita lihat ini ada pembatasan yang saya ketahui Bu pembatasan dari baik kelurahan, ataukah kecamatan misalnya dia memberikan jatah di kelurahan ini ada sekian, jadi dibatasi. Nah sementara yang mendata adalah ketua RW, ketua RT setelah cukup data itu, itu mereka stop tidak mau lagi menggali data yang betul-betul misalnya orang yang miskin. Ini mungkin saya mau minta penjelasan dari ibu, apakah memang ada pembatasan jumlah jatah untuk pembagian dana sosial ini?

Kemudian yang berikutnya adalah saya kira untuk petugas pendataan ini juga perlu diperhatikan, karena mereka mengatakan kami kerja dengan ikhlas saja ini. Apalagi RT/RW yang ada didesa-desa itu mengatakan seperti itu Bu, tidak ada insentifnya, nah ini saya kira untuk Kementerian Sosial perlu memperhatikan ini, Mungkin ada honor sementara misalnya Ketua RW itu gajinya hanya Rp500.000,- satu bulan, sudah dipotong pajak dan lain sebagainya. Nah ini saya kira padahal garda terdepan itu adalah misalnya RT-RT, atau kepada dusun dan lain sebagainya. Saya kira ini perlu diperhatikan, sehingga mereka ada semangat untuk bekerja, mencari data yang betul-betul valid, saya kira itu Bu dari saya, mudah-mudahan ada semacam penambahan honor kepada mereka. Saya kira itu sedikit tambahan, terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

## **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Baik, terima kasih pak Rizal dari PAN, Bu Menteri beserta seluruh jajaran bapak, ibu. Sesuai dengan komitmen waktu tadi, kita akhiri di 12.30 WIB. Yang jelas ada pelajaran terbaik ini Bu Menteri, karena kalau kita lihat paparan Bu Menteri nama Yati banyak sekali, nama Slamet banyak sekali, NIK-nya ganda tapi uangnya ngalir terus bu. Nah saya kira Himbara perlu kita panggil bank-bank penempatan itu kenapa itungannya terus ngalirnya kemana? Kalau bu Menteri jelas Yati diverifikasi satu orang yang benar, tapi Yati yang lain kenapa juga terima siapa yang terima ini? Nah saya kira itu pelajaran terbaik kita hari ini Bu, ya uangnya habis terus tapi orangnya kira-kira tidak jelas kan Bu? Akhirnya data itu ditidurkan untuk kita tertibkan ke depan. Nah mungkin itu bagian dari pengawasan kami bu Menteri ya, informasinya sangat mahal hari ini, kita lihat banyak yang perlu kita tindaklanjuti, karena bagaimana mungkin uangnya hilang tapi yang menerimanya tidak jelas. Kira-kira begitu ya, supaya nanti angka ke depan anggaran itu bisa lebih tetap sasaran.

Mungkin itu Bu Menteri status rapat hari ini kita skors Bu, kita akan lanjutkan cari waktu yang pas dengan Bu Menteri, dengan para Anggota sehingga kita benar-benar leluasa dari hati ke hati untuk menuntaskan masalah data ini Bu, informasi dari Bu Menteri hari ini sangat berharga dan menjadi landasan pemikiran bagi kami yang sudah bertanya maupun belum bertanya sehingga nanti lebih diperdalam. Walaupun statusnya diskors, kami persilakan untuk Bu Menteri menyampaikan kata akhir dalam rapat hari ini. Silakan Bu.

## **MENTERI SOSIAL RI (TRI RISMAHARINI):**

Terima kasih bapak Pimpinan, Ketua dan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI. In sya allah tidak ada niat apa pun di saya hanya karena memang temuan ini Pak, saya ke BPKP mungkin selama jadi menteri mungkin 10 kali sudah. Karena saya harus konsultasi terus bagaimana? Supaya nah juga jada temuan BPK ini saya juga minta BPK untuk bisa bertemu, boleh dicek pak Sekjen, jadi ini adalah masalah teknis pak temuan-temuan tadi. Tidak ada, saya bersyukur di BPKP tidak ada media, jadi meskipun saya 10 kali kesana tidak ada yang muat, banyak sekali saya juga sempat kaget waktu itu.

Jadi saya diundang beberapa media saya sampaikan saya selalu sibuk. Jadi tidak ada niat insyaallah dari saya untuk apapun. Saya hanya ingin menuntaskan pemeriksaan-pemeriksaan BPK ini *clear*, karena kalau tidak nanti tahun depan saya akan ditagih lagi itu hasilnya. Bagaimana progres ke depannya? Insyaallah tidak ada, kalau saya selalu sampaikan ke teman-teman kalau dulu kalifah Umar bin Khatab siap *dibeleg* dadanya untuk membuktikan. Nah saya juga siap sama.

Kalau minta pernyataan bahwa saya tidak akan menuntut dan

keluarganya saya siap, tidak ada niatan apa pun. Tidak ada niatan, insyaallah tidak ada niatan apa pun. Jadi hanya memang saya harus konsultasi teknis, ini kalau ini bagaimana? Ini kalau ini bagaimana, supaya saya juga langkah saya juga benar, karena kalau tidak saya akan tidak tahu langkah saya ini benar atau tidak? Yang saya lakukan untuk pencegahan, sekali lagi untuk pencegahan di KPK sana juga yang menerima pencegahan, deputi pencegahan.

Demikian pula dengan Kejaksaan Agung, tadi disampaikan kenapa laporan itu banyak sekali Pak? Yang disampaikan Pak Husni itu betul kenapa bagaimana tidak emosi Pak saya, bukan satu kali Pak, saya menerima ini laporan ini, sampai saya sampai inspektur ini awalnya saya serahkan ke inspektur lho kok gini pemeriksaannya? Akhirnya saya minta Kejaksaan Agung sekarang Kejaksaan Agung yang memeriksa Pak, ini di Madura ada Deli Serdang, ada Deli Jombang ada banyak sekali KIS-nya.

Nah saya sampaikan saya sampaikan waktu itu di BPK karena Kejaksaan Agung saya minta pak tolong *mbok* satu, kenapa terus terang saya juga ketakutan pak kalau begini terus. Bagaimana mungkin kita bisa mengawasi PKH yang sekian ribu, puluh ribu desa, bagaimana mungkin makanya kenapa saya kita buka saja semua. Semua boleh membeli di tempat siapa pun, tetangganya boleh, ada yang disini dibelinya harus dijauh, dia menyampaikan saya harus ngangkut Bu. Saya harus mengeluarkan ongkos inikan tidak adil untuk orang miskin.

Jadi kenapa kemudian padahal tetangga saya juga jualan, sudah itu jualannya itu hanya telur, beras, buah dia tidak butuh buah, saya tidak butuh buah Bu. Dia mungkin uangnya terbatas, ya saya butuhnya beras, tapi saya harus beli 3, saya surat banyak sekali Pak. Jadi kenapa kemudian saya oke kita bahas, siapa pun boleh jualan, nanti hanya pakai handphone saja pelaporannya nanti saya akan siapkan software untuk itu. Jadi tidak ada apapun tapi kenapa karena kalau terlalu sering, kalau saya diam saja saya dosa Pak, ini adalah amanah ke saya, termasuk saat ini kemarin saya sampaikan, gimana ya ini, Bu ini amanah ibu tahu karena ibu tahu ibu harus ngomong, saya buka pak seperti itu kira-kira pak. Jadi tidak ada yang Yati ya tetap dapat Yati, tapi dulunya menerima 12 ya tinggal satu wong dia NIK-nya sama, jadi ganda itu, itu Pak.

Jadi bukan kalau saya tidurkan karena saya dulu punya pengalaman begitu dihapus kita ambil lagi tidak ada yang tahu pak, tidak ada yang tahu, jadi itu terjadi. Dulu pernah di Surabaya tahun berapa itu dihapus setelah meninggal, ternyata data itu diambil lagi, dia buat KTP kemudian untuk membobol bank, tapi kalau ditidurkan dia *ngajukan* tidak bisa karena dia sudah ada data mati. Tidak bisa o ada datanya di *compare* begini, bisa. Jadi mohon maaf pak saya menggunakan teknologi saat saya Kepala Bagian Bidang Pembangunan tahun 2002. Tahun 2002, Surabaya belum banyak internet saya tahu. Ini sekarang ini saya juga lagi menghubungkan daerah-daerah Pak diberi repeater untuk mereka bisa akses itu, kalau tidak pak kami yang turun, kita sudah turun di beberapa daerah melakukan itu, untuk perbaikannya.

Saya kira begitu bapak mohon maaf, mohon izin sekali mohon maaf

tidak ada niat apapun tapi karena sudah terlanjur janji, karena setelah itu saya juga dapat mandat dari Pak Ace untuk menghadap pak presiden. *Alhamdulillah* hari ini saya bisa *ngadep* untuk yang bencana.

**KETUA RAPAT:**

Zero bencana Bu, ya? Baik bapak ibu mohon maaf yang belum sempat bertanya atau dari meja pimpinan juga, kita sepakat ini diskors waktunya kita cari yang pas ya Bu supaya tuntas terhadap isu-isu masalah data ini sehingga nanti di kesimpulannya itu benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan secara bersama-sama baik dari Kemensos maupun dari Komisi VIII.

Baik, dengan mengucapkan *Alhamdulillah* raker ini saya skors dengan waktu yang selanjutnya akan ditentukan berikutnya.

Terima kasih.

**RAPAT DITUTUP PUKUL. 12.37 WIB**

**Jakarta, 24 Mei 2021  
a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,**

**Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.  
NIP. 197309261997031001**